

**Perlawanan Masyarakat Dukuh Sepat terhadap Pemerintah Kota Surabaya  
dalam Konflik Hak Atas Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon Surabaya**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Metode Ilmu  
Politik**

**Oleh:**

**Cyntia Martha Elisabet**

**145120501111028**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

**PERLAWANAN MASYARAKAT DUKUH SEPAT TERHADAP  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM KONFLIK HAK ATAS  
WADUK SEPAT KELURAHAN LIDAH KULON SURABAYA**

**Disusun Oleh:**

**Cyntia Martha Elisabet  
NIM. 145120501111028**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Faqih Alfian, S.IP., M.IP  
NIK. 201405 861216 1 001  
Tanggal:**

**Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP  
NIK. 201309 800707 1 001  
Tanggal:**

**PERLAWANAN MASYARAKAT DUKUH SEPAT TERHADAP  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM KONFLIK HAK ATAS  
WADUK SEPAT KELURAHAN LIDAH KULON SURABAYA**

**Disusun Oleh:**

**Cyntia Martha Elisabet  
NIM. 145120501111028**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Politik  
Pada tanggal 5 Juli 2018

Tim Penguji :

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Faqih Alfian, S.IP., M.IP  
NIK. 201405 861216 1 001

Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP  
NIK. 201309 800707 1 001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II

Dr. Abdul Aziz S.R., M.Si

Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS  
NIP. 19520101 198203 1 006

**Malang, 5 Juli 2018**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 19690814 199402 1 001

## HALAMAN PERNYATAAN

**Nama: Cyntia Martha Elisabet**

**NIM. 145120501111028**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PERLAWANAN MASYARAKAT DUKUH SEPAT TERHADAP PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM KONFLIK HAK ATAS WADUK SEPAT KELURAHAN LIDAH KULON SURABAYA** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 5 Juli 2018

Pembuat Pernyataan

Cyntia Martha Elisabet

NIM. 145120501111028

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, serta penyertaan-Nya sehingga penelitian skripsi dengan judul **Perlawanan Masyarakat Dukuh Sepat terhadap Pemerintah Kota Surabaya dalam Konflik Hak Atas Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon Surabaya** ini dapat diselesaikan dengan lancar oleh penulis.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Kedua Orang Tua, atas segala dukungan baik berupa doa, semangat, maupun materi, serta kesempatan untuk menjalankan studi saya di Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.
2. Abang dan Adik saya, atas dukungan dan bantuan materil dan juga doa yang selalu diberikan dalam pengerjaan skripsi ini agar penulis dapat segera mendapatkan gelar sarjana.
3. Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) periode 2016 serta Dr. Sholih Mu'adi, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Politik, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional dan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UB yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanan terbaik selama penulis menimba ilmu di FISIP UB
4. Bapak Faqih Alfian, S.IP., M.IP dan Bapak Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu

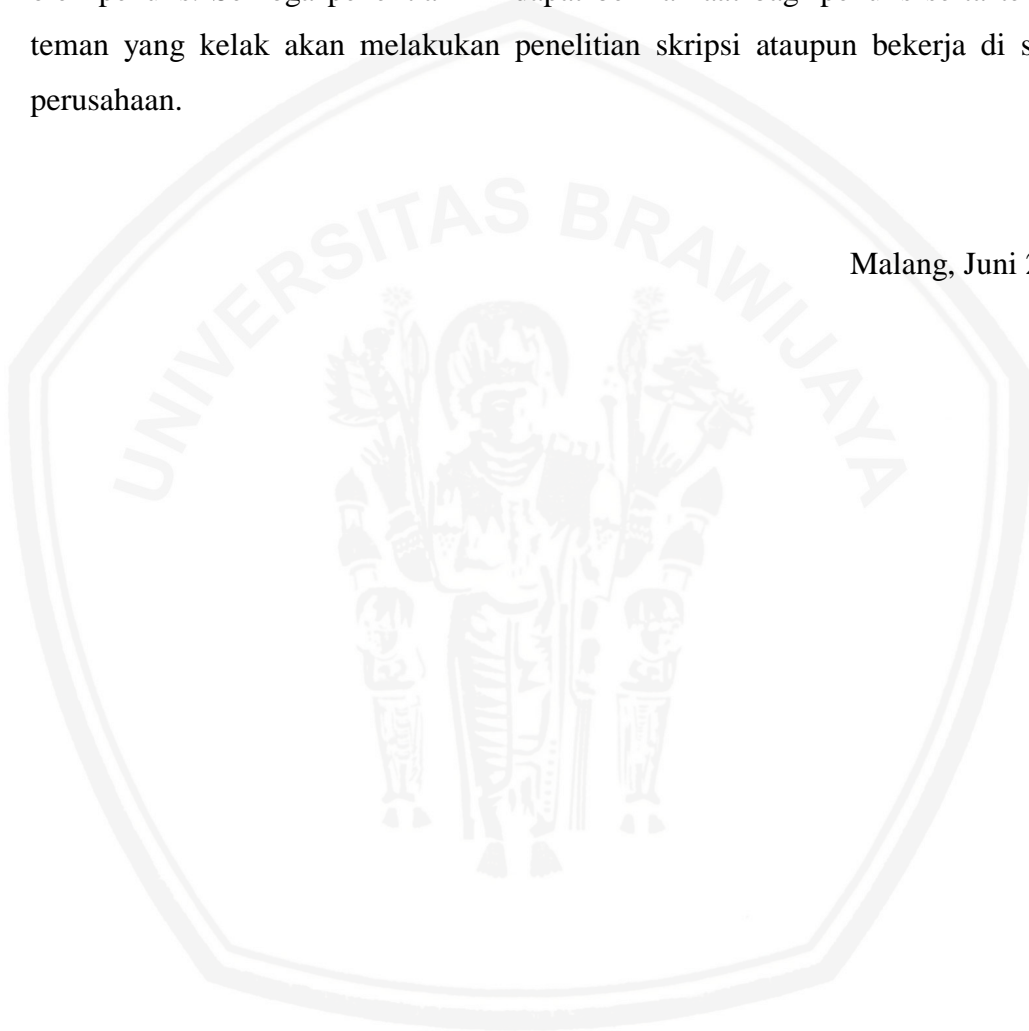
memberikan masukan dan ilmu yang sangat berarti selama bimbingan skripsi saya.

5. Bapak Dr. Abdul Aziz S.R. M.Si dan Bapak Dr. Drs. Hilmy Mochtar.,M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan yang sangat membangun bagi penulisan skripsi penulis.
6. Desiana Putri atau Otang, selaku sahabat yang menemani penulis dari bangku SMP sampai sekarang yang membangkitkan semangat penulis walaupun terkadang sering menjatuhkan.
7. Syifa Rizky atau Kiky, selalu teman yang sudah banyak menemani penulis dari maba hingga sekarang dan banyak menemani penulis dalam melakukan penelitian ini.
8. Mariela dan Otang, yang selalu setia menjadi sahabat yang selalu menyemangati penulis dari bangku SMP sampai sekarang
9. KHP (Kiky, Amalina, Dina, Widy, Admira, Dealita, Yoka, Oggy, Ersha), selaku keluarga kecil penulis di Kota Malang yang indah ini.
10. Geng Antoks (Otang, Kiky, Natasya, Amalina, Reynita, Meri, Kalila, Ruth), selaku sahabat-sahabat penulis di kosan yang sangat penuh keceriaan dengan sang penjaga kos.
11. Sahabat-sahabat tersayang di Bekasi
12. Keluarga PMK Yosua, yang menjadi tempat persekutuan di Kota Malang terlebih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
13. NHKBP MALANG yang menjadi tempat persekutuan gereja di Kota Malang ini
14. Kota Surabaya, terkhusus Kelurahan Lidah Kulon dan Masyarakat Dukuh Sepat.
15. Keluarga besar Ilmu Politik angkatan 2014, Universitas Brawijaya, Malang.

16. Seluruh pihak yang terlibat dan telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi yang disusun oleh penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis serta teman-teman yang kelak akan melakukan penelitian skripsi ataupun bekerja di suatu perusahaan.

Malang, Juni 2018





## ABSTRAK

**Cyntia Martha Elisabet, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Perlawanan Masyarakat Dukuh Sepat Terhadap Sengketa Lahan Waduk Sakti Sepat Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. Tim Pembimbing: Faqih Alfian, S.IP., M.IP dan Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP.**

---

Masyarakat Dukuh Sepat yang sampai saat ini memperjuangkan Waduk Sepat yang saat ini menjadi sengketa antara warga dengan Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Ciputra Surya Tbk atau yang biasa disebut Citraland. Hal ini bermula dari Surat Keputusan Wali Kota Surabaya No.188.45/366/436.1.2/2008 yang isinya mengenai tukar guling antara lahan Waduk Sepat di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya dengan tanah PT. Ciputra Surya Tbk yang saat ini sudah menjadi *Surabaya Sport Center* (SSC) di Kelurahan Pakal Surabaya. Dalam proses tukar guling tersebut belum ada kesepakatan pasti antara warga dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya ataupun pihak pengembang. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bentuk gerakan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Sepat dalam memperjuangkan Waduk Sepat, faktor dari sengketa lahan yang terjadi, cara yang digunakan masyarakat dengan LSM berkoordinasi dalam mengembangkan isu dan menyatukan ide.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama dalam perlawanan masyarakat yang dilakukan terhadap sengketa lahan Waduk Sepat adalah kehidupan sosial budaya yang sudah melekat di daerah tersebut dan beberapa ritual yang dilakukan untuk menghormati sesepuh daerah tersebut serta aspek lingkungan yang menunjukkan fungsi dari waduk tersebut. Gerakan perlawanan masyarakat memiliki strategi dan aksi yang tidak biasa. Dilihat dari aksi forum warga, *hearing*, unjuk rasa, aksi damai, aksi lingkungan, aksi hukum, dan gerakan intelektual. Gerakan ini bersifat konsisten dan semakin lama semakin menguat untuk tetap memperjuangkan Waduk Sepat.

**Kata Kunci: Waduk Sepat, Gerakan Sosial, Strategi, Mobilisasi Sumber Daya, Perlawanan Politik**



## ABSTRACT

**Cyntia Martha Elisabet, Bachelor Program, Study Political Science, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Brawijaya Malang, 2018. The Resistance of Dukuh Sepat Society against The Dispute over Waduk Sakti Sepat Land in Lidah Kulon Surabaya. Supervised by: Faqih Alfian, S.IP., M.IP and Tri Hendra Wahyudi, S.IP., M.IP.**

---

Dukuh Sepat people have been struggling to defend Waduk Sepat land that become the dispute over locals versus Surabaya government and PT. Ciputra Surya Tbk, or well-known as Citraland until this day. The dispute based on Surabaya Mayoral Decree No.188.45/366/436.1.2/2008 about the land swap between Waduk Sepat in Lidah Kulon Surabaya and PT. Ciputra Surya Tbk which is now built into Surabaya Sport Center located in Pakal Surabaya. There still no definite deals within the land swap process between locals and both Surabaya Government and the developer. The objectives of this research are to explain what kind of resistance movement carried out by Dukuh Sepat people to defend Waduk Sepat land, causative factors lead to the land dispute, and the way how locals and the Non-Governmental Organization coordinate in working out the issues and unifying the ideas.

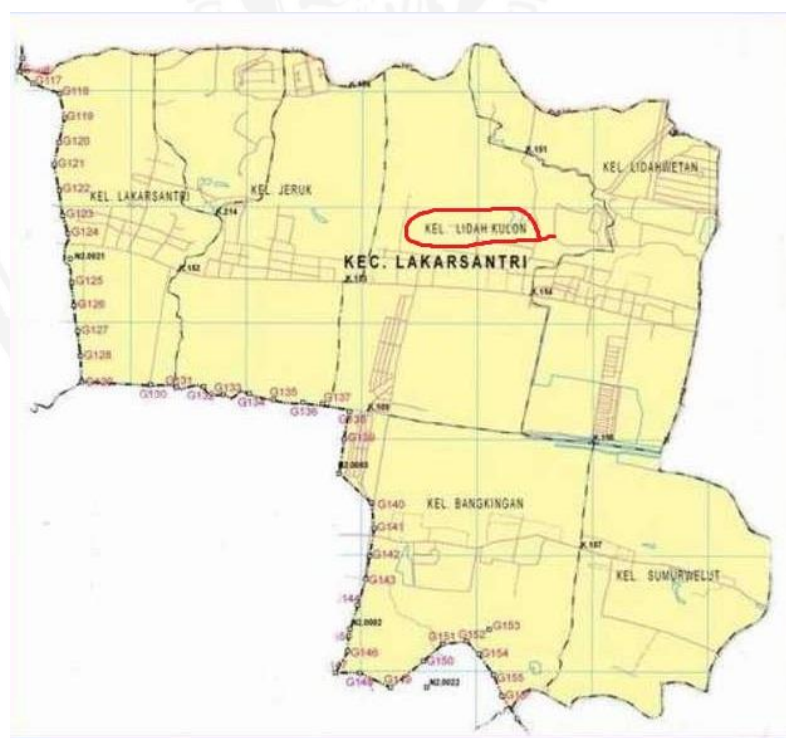
This research uses qualitative descriptive method analysing the data collected through interview, observation, literature review, and documentation. The results obtained in this research indicate that the primary factor of the community resistance against the land dispute of Waduk Sepat is regarding to socio-cultural life that stick around to the land, some rituals performed to give the tributes toward the elders, and also environmental aspects representing the function of the dam. The community resistance movement has unusual strategies and actions. It has been shown through the community forum, hearing, demonstrations, peaceful protests, environmental protests, legal protests, and intellectual movements. The movements are consistence and increasingly stronger to defend Waduk Sepat land.

**Keywords: Waduk Sepat, Social Movement, Resource Mobilization, Politic Resistance.**

## PETA SURABAYA BARAT DAN KELURAHAN LIDAH KULON YANG MENJADI LOKASI PENELITIAN



catatan : Lokasi penelitian terdapat di Kota Surabaya Barat yang lingkari merah



Catatan : Kelurahan Lidah Kulon yang menjadi lokasi utama penelitian

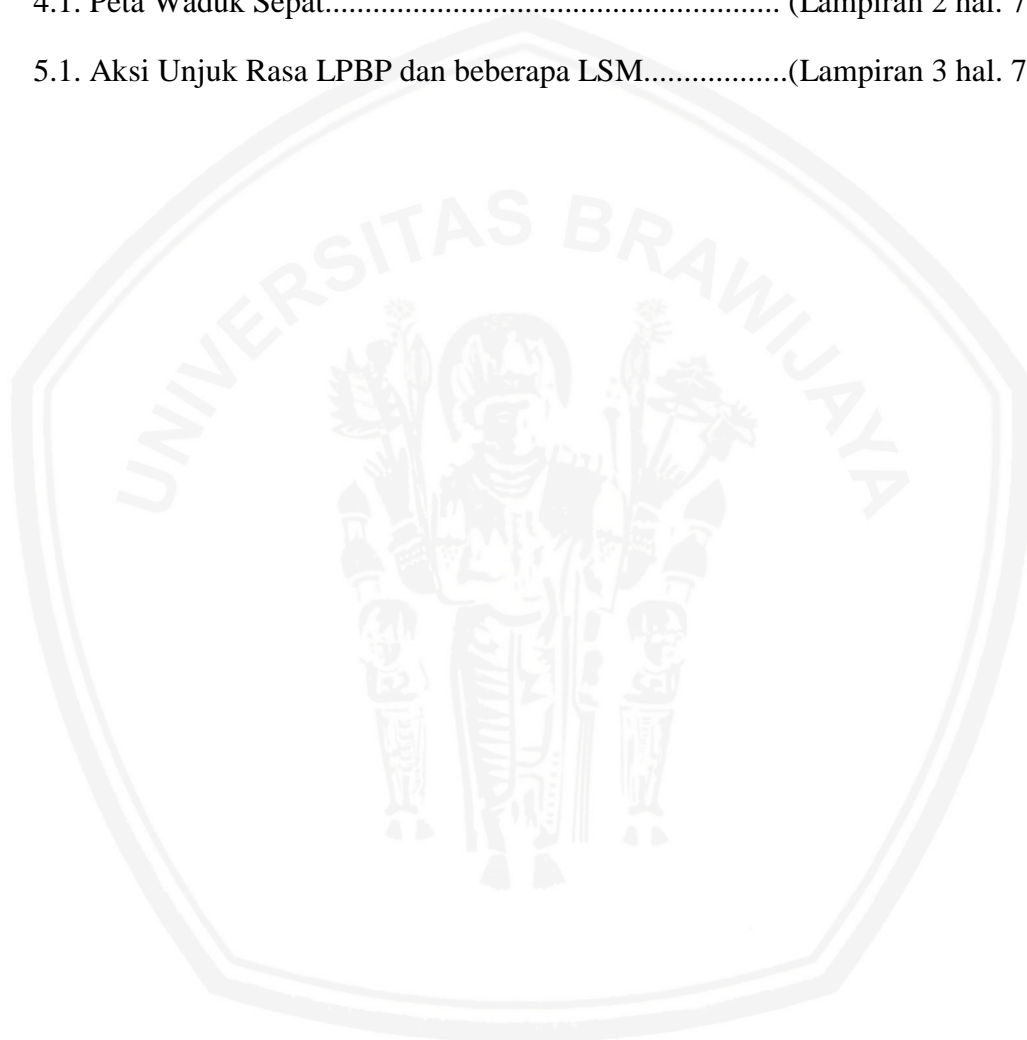
## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
PETA SURABAYA BARAT DAN KELURAHAN LIDAH KULON YANG MENJADI LOKASI PENELITIAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1. Rumusan Masalah .....	5
1.2. Tujuan Penelitian.....	5
1.3. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Kerangka Teori.....	8
2.2.1. Gerakan Sosial .....	8
2.3. Kerangka Pemikiran .....	20
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN.....	22
3.1. Metode Penelitian.....	22
3.2. Informan Penelitian .....	23
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.4. Teknik Analisis Data .....	26
3.5. Keabsahan Data .....	27
BAB IV .....	28
GAMBARAN UMUM WADUK SEPAT .....	28
4.1. Kelurahan Lidah Kulon .....	28
4.1. Sejarah Desa dan Waduk Sepat.....	32

4.2. Penduduk .....	36
4.3. Mata Pencarian .....	37
4.4. Kesenian .....	38
BAB V.....	40
GERAKAN PERLAWANAN LASKAR PEMBELA BUMI PERTIWI.....	40
5.1.....Konflik Waduk Sepat .....	40
5.2. Terbentuknya Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP).....	45
5.3. Perlawanan Warga Dukuh Sepat .....	47
5.3.1. Aspek Ekonomi.....	48
5.3.1. Aspek Lingkungan.....	49
5.3.2. Aspek Sosial Budaya.....	51
5.4. Framing Isu Laskar Pembela Bumi Pertiwi .....	55
5.5. Strategi dan Aksi Gerakan.....	60
5.5.1. Forum Warga .....	60
5.5.2. Hearing DPRD Surabaya .....	61
5.5.3. Gerakan Jalanan.....	63
5.5.4. Aksi Damai.....	66
5.5.5. Aksi Lingkungan.....	66
5.5.6. Gerakan Intelektual.....	67
BAB VI .....	70
PENUTUP.....	70
6.1. Kesimpulan.....	70
6.2. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
DAFTAR LAMPIRAN .....	76
DOKUMENTASI PENELITIAN .....	78

## DAFTAR GAMBAR

1.1. Tindakan Penolakan Masyarakat.....	(Lampiran 1 hal. 73)
2.4. Kerangka Pemikiran.....	20
4.1. Peta Waduk Sepat.....	(Lampiran 2 hal. 73)
5.1. Aksi Unjuk Rasa LPBP dan beberapa LSM.....	(Lampiran 3 hal. 74)



## DAFTAR ISTILAH

UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
SK	: Surat Keputusan
Ha	: Hektar
HGB	: Hak Guna Bangunan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup
LPBP	: Laskar Pembela Bumi Pertiwi
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TKD	: Tanah Kas Dewa



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Fenomena tentang pengembangan daerah ini sampai sekarang pun ternyata masih banyak menuai pertentangan yang berasal dari masyarakat, terutama dari warga setempat. Penolakan ini mayoritas bersumber pada permasalahan hak atas tanah, yang akhirnya ada beberapa proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang dan masih menyisakan banyak kasus yang sampai sekarang tidak terselesaikan. Dari permasalahan tanah ini pun, hubungan antara manusia dengan tanah inilah sangat erat, karena tanah adalah tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.<sup>1</sup> Kebijakan pertanahan yang menjadi landasan bagi Undang-Undang Pokok Agraria yang dikenal sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dimana Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan pengertian Agraria, hanya memberikan ruang lingkup sebagaimana yang dimaksudkan sebagai undang-undang induk keagrarian mencakup pembaruan relasi sosial di atas tanah.<sup>2</sup>

Pembangunan di Kota Surabaya secara umum dulunya dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, terutama di kawasan Surabaya Barat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa lokasi yang strategis, dekat dengan pusat kota, adanya akses jalan masuk, lalu lintas yang belum terlalu padat, dan keadaan lahan yang masih asli dan belum banyak disentuh oleh

---

<sup>1</sup> Rangga Pati Liandra (2014), "*Jurnal: Managemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa TangaKec. Bangun Purba Rokan Hulu Tahun 2012-2013*", Riau: Fisip Universitas Riau, Vol.1 No.2 hal. 1

<sup>2</sup> Affan Mukti (2010), "*Jurnal : Pembahasan Undang-Undang Agraris Nomor5 Tahun 1960*", Medan ; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 3 No. 4, hal 18.



pembangunan kota. Kondisi yang seperti ini menyebabkan kawasan Surabaya Barat banyak diincar oleh para pengembang untuk mengembangkan daerah ini. Ada bagian lokasi yang terletak di beberapa Kelurahan seperti Kelurahan Made, Kelurahan Lontar, Kelurahan Sumurwelut, Kelurahan Bangkingan, Kelurahan Sambikerep, Kelurahan Jeruk, Kelurahan Lakarsantri, dan Kelurahan Lidah Kulon yang berada di daerah pinggiran kota. Di daerah ini masih banyak lahan pemukiman dan pertanian yang ditemukan. Para pengembang yang mengupayakan pembebasan lahan untuk mewujudkan proyek pembangunan yang mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Munculnya konflik perebutan lahan berupa waduk yang dianggap milik masyarakat setempat sekarang telah menjadi isu yang sudah lama beredar dimana pihak pengembang akan menjadikan waduk tersebut menjadi salah satu hunian elite. Pihak yang berkuasa merasa memiliki kelengkapan dokumen resmi yang telah disahkan oleh pemerintah setempat. Namun disisi lain, warga setempat merasa bahwa waduk tersebut merupakan peninggalan nenek moyang mereka. Akhirnya muncul beberapa perbedaan persepsi diantara beberapa pihak yang ujungnya menimbulkan konflik, yang dimana masing-masing pihak tidak ingin merasa dirugikan. Konflik pun muncul atas suatu kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah konflik sengketa lahan di wilayah Surabaya Barat, yaitu Sengketa Lahan Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon Surabaya.

Waduk Sakti Sepat ini dulunya merupakan lokasi wisata yang terletak di Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Warga setempat mengatakan bahwa waduk ini

telah menjadi identitas bagi warga sekitar karena waduk tersebut dibangun dengan prakarsa warga secara mandiri untuk dapat menghindari banjir akibat luapan air hujan. Selain itu Waduk Sepat dulunya dikenal mempunyai fungsi sosial bagi masyarakat Dukuh Sepat, diantaranya tempat wisata pemancingan dan perahu, tempat pemeliharaan ikan yang biasa dipanen oleh Warga Dukuh Sepat, tempat berjualan warga yang melayani pendatang yang ingin berkunjung ke Waduk Sepat, tempat untuk berdoa bersama dalam acara bersih-bersih kampung. Dapat dikatakan Waduk Sepat ini menjadi kebudayaan dan perekat hubungan sosial warga Dukuh Sepat. Tanah Waduk Sepat ini merupakan Konflik yang terjadi antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk atau yang biasa disebut Citraland dengan masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitar waduk tersebut yaitu warga dukuh sepat RW III dan RW V Kelurahan Lidah Kulon Surabaya.

Waduk yang seluas 6,675 hektar diklaim oleh masyarakat setempat bahwa tanah tersebut adalah milik mereka yaitu masyarakat Dukuh Sepat dan tidak bisa diganggu gugat oleh PT. Ciputra Surya Tbk. Tidak hanya Waduk Sepat, sebelumnya juga terdapat Waduk Jeruk yang saat ini sudah berubah fungsi menjadi perumahan elite. Waduk Sepat dan Waduk Jeruk ini masuk ke dalam satu paket SK Walikota No. 188.45/366/436.1.2/2008. Sebelumnya waduk yang terletak di wilayah tersebut memiliki fungsi untuk menampung air hujan, sehingga ketika hujan deras melanda wilayah pemukiman warga jarang terjadi banjir. Selain itu waduk ini pun berfungsi sebagai kolam pemancingan dan dibukanya warung di sekitar waduk jadi mampu meningkatkan aktivitas ekonomi warga sekitar. Apabila fungsi waduk ini berubah menjadi hunian elite maka dapat

dipastikan warga akan kehilangan mata pencaharian mereka, terutama di dalam bidang ekonomi. Dan jika waduk itu hilang maka penduduk setempat pun akan hilang dari pemukiman asalnya.

Pencegahan dan perlawanan pun dilakukan oleh warga dengan sebuah aksi maupun aktivitas lainnya sebagai bentuk dari gerakan sosial.<sup>3</sup> Warga tidak berjalan sendiri yang pasti bersama beberapa LSM yang membantu sebagai bentuk aksi kolektif. Peran LSM turun sebagai tindakan untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat. Dalam kasus ini pun dirasa terdapat kejanggalan saat proses tukar guling yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan dengan pihak pengembang. LSM yang berperan dalam kasus ini tidak hanya satu saja, tetapi mereka juga memanfaatkan jaringan lain untuk menyatukan kekuatan dalam melaksanakan advokasi gerakan.

**Gambar 1.1 Tindakan Unjuk Rasa**



Beberapa Tindakan Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Masyarakat  
Sumber : LBH Surabaya

<sup>3</sup> Perlawanan menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan orang atau sekelompok yang memaksakan kehendaknya kepada pihak lain meskipun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa frustrasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan yang ada ditengah-tengah mereka.

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti tertarik dengan masalah ini karena permasalahan sengketa lahan waduk ini belum terselesaikan dari tahun ke tahun hingga saat ini. Untuk itu dari penelitian ini terdapat hal yang menarik terkait permasalahan tersebut yaitu, bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Sepat terkait sengketa lahan Waduk Sepat di Surabaya? Dan bagaimana framing isu yang dilakukan oleh gerakan tersebut sehingga mendapat dukungan dari masyarakat Dukuh Sepat yang bertahan hingga saat ini? .

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan, yaitu :

1. Apa saja aspek-aspek yang mendorong masyarakat Dukuh Sepat melakukan perlawanan terhadap perubahan alih fungsi atas Waduk Sepat?
2. Bagaimana strategi dari gerakan Laskar Pembela Bumi Pertiwi dalam melakukan perlawanan terhadap perubahan alih fungsi atas Waduk Sepat?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang mendorong masyarakat Dukuh Sepat melakukan. perlawanan terhadap perubahan alih fungsi atas Waduk Sepat.
2. Untuk mengetahui strategi dan aksi apa saja yang dilakukan oleh gerakan Laskar Pembela Bumi Pertiwi dalam melakukan perlawanan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan di dapat dari penelitian ini adalah :

Dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam keilmuan di bidang politik terutama pada kaitannya dengan studi politik lingkungan dan nilai budaya lokal. Selain itu, penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi pihak yang ingin mengetahui awal mula konflik sengketa lahan Waduk Sepat dan mengetahui alasan dari penolakan masyarakat terhadap pemerintah Kota Surabaya dalam konflik hak atas waduk di Waduk Sepat khususnya bagi masyarakat yang disekitar waduk. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangan bagi semua pihak khususnya dalam hal tujuan dari sebuah alih fungsi Waduk Sepat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari kedua penelitian tersebut. Disisi lain, penelitian terdahulu tersebut juga terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dimana persamaan tersebut terletak pada permasalahan terkait dengan gerakan perlawanan masyarakat dan lokasi penelitian Waduk Sepat sebagai fokus kajian penelitian. Sedangkan untuk perbedaan yang mendasar dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan yaitu bagaimana strategi yang digunakan serta aspek yang mendorong lalu fokus pada perbedaan permasalahan dari kebijakan yang menggunakan teori berbeda.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Fokus Penelitian
Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penguasaan Lahan Oleh Pengembang Di Wilayah Surabaya Barat ( Studi Tentang Sengketa Kasus Waduk Sepat Lidah Kulon)	Ruri Widyani	2012	Penelitian ini berfokus tentang kebijakan pemerintah Kota Surabaya tentang penguasaan sengketa kasus Waduk Sepat Lidah Kulon. Dalam jurnal ini, menggunakan <i>cluster, power, and place</i> dan teori konflik dengan memakai beberapa konsep, antara lain kekuasaan.

Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Melawan Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang	Ahmad Sufyan		Penelitian ini untuk meneliti gerakan sosial yang hadir dalam rangka merespon kebijakan neoliberalisme yang pada dasarnya menghilangkan paham kedaulatan rakyat.
--	--------------	--	--

## 2.2. Kerangka Teori

### 2.2.1. Gerakan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Gerakan Sosial adalah tindakan yang direncanakan dan dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada perubahan sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Yang dimaksud gerakan sosial adalah gerakan yang timbul sebagai perilaku kolektif yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada didalamnya.

Perkembangan gerakan sosial tidak terlepas dari adanya kesepakatan yang dibangun dari para ahli bahwa ternyata beberapa dekade terakhir frekuensi, variasi dan intensitas gerakan perlawanan semakin bertambah dan menjadi sangat kompleks. Gerakan sosial dimaknai sebagai suatu kelompok masyarakat yang didalamnya guna untuk melakukan satu tindakan yang terencana sebagai tujuan terjadinya perubahan dari peristiwa yang sebelumnya terjadi. Kemunculan gerakan sosial diawali dengan dengan rasa kekecewaan dan ketidakpuasan, bentuk dari rasa ketidakpuasan bisa terhadap peraturan yang ada, kondisi politik yang



menindas, keadaan ekonomi yang memburuk, diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu yang dilihat dari perspektif berbeda-beda.<sup>4</sup>

Menurut Baldrige, gerakan sosial merupakan sebuah bentuk perilaku kolektif yang terdiri dari kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisir untuk mempromosikan atau sebaliknya menghalangi terjadinya perubahan. Dalam sebuah organisasi gerakan harus memiliki tujuan dan struktur yang jelas, serta memiliki ideologi yang mengarah pada perubahan. Gerakan dilakukan secara sadar dan jelas dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang mereka inginkan, yang pada umumnya dilakukan melalui aktivitas politik atau pendidikan. Gerakan sosial yang dilakukan bisa berupa pemogokan, rapat umum, boikot, pendirian partai, mendirikan surat kabar, serikat buruh, karya sastra, atau lagu-lagu.

Studi tentang protes kolektif dan gerakan sosial yang tidak terlepas dari yang dilakukan oleh berbagai kelompok, organisasi atau jaringan yang menentang para pemegang kuasa politik, ekonomi dan sosial. Fenomena protes kolektif dan gerakan sosial pun harus dikaji dengan menggunakan pendekatan siklus agar dapat mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan proses terjadi dalam periode tertentu. Secara umum, tindakan protes kolektif ini sangat dipengaruhi dengan tersedianya atau tidak tersedianya kesempatan politik, siap tidaknya organisasi-organisasi gerakan baik formal maupun non-formal, dan tersedianya atau tidak

---

<sup>4</sup> Manulu, Dimpos. (2009). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Hal : 9

tersedianya kerangka *framing* gerakan dan tersedianya atau tidak tersedianya bentuk-bentuk perlawanan yang kreatif dan inovatif.<sup>5</sup>

Dari sisi lainnya gerakan sosial hadir dengan ketidakpuasan yang didalamnya masyarakat pun di dimunculkan oleh kesadaran karena ketidakadilan yang disebabkan oleh tekanan dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan ketika masyarakat memiliki harapan yang tinggi, sedangkan negara tidak mampu mewujudkannya. Kejadian ini sering kali terjadi pada masyarakat miskin di perkotaan di Indonesia yang dalam aktivitasnya di fasilitasi oleh gerakan LSM atau gerakan mahasiswa. Awalnya kesadaran masyarakat atau individu masih terpisah-pisah, namun dengan kehadiran seperti gerakan LSM dan mahasiswa ini pun mampu menyatukan kesadaran yang terpisah menjadi sebuah aksi yang kolektif. Namun disatu sisi, masyarakat juga membangun hubungan sosial dengan LSM dan mahasiswa untuk memperjuangkan Waduk Sepat yang menjadi sengketa agar fungsinya kembali seperti sedia kala. LSM ini melakukan advokasi di wilayah tersebut dan telah membangunkan kesadaran masyarakat dan menyatukan kesadaran individu tersebut menjadi aksi kolektif. Menurut Mc Adam kemunculan serta perkembangan gerakan sosial terdapat tiga faktor utama yaitu, struktur kesempatan politik, *framing* atau pembingkaihan dan mobilisasi sumber daya.<sup>6</sup> Kesempatan politik lebih menekankan pada struktur institusi atau kekuasaan

---

<sup>5</sup> Abdul Wahib Situmorang.(2013). *Gerakan Sosial : Teori dan Praktik* .,Yogyakarta: Pustaka Pelajar,. Hlm 87-88

<sup>6</sup> Dipublikasikan dalam Irawati (2012), “*Jurnal: Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kurai Dala, Reprerentasi Politik Lokal*”, Padang: Universitas Andalas, Vol. 3 No.1. hal. 68.

informal pada kekuasaan formal. *Framing* sebagai perantara peluang, organisasi dan aksi. Mobilisasi sumber daya lebih memusatkan pada kendaraan kolektif yang bersifat formal maupun informal dimana orang bergerak dan terlibat dalam aksi kolektif.<sup>7</sup> Dalam perspektif demikian unit analisis tidak hanya mengarahkan pada individu sebagai partisipan gerakan, akan tetapi pada kelompok.

### 1. Struktur Kesempatan Politik

Dalam perkembangannya kebangkitan dari gerakan sosial sangat dipengaruhi oleh struktur kesempatan politik. Hal ini menjadi dasar dalam pendekatan proses politik. Gerakan sosial ditentukan oleh peluang dan ancaman di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas.<sup>8</sup> Maka dari itu hal inipun menjadi dasar pendekatan proses politik, dimana proses politik sendiri mengacu kepada sebuah keadaan dimana seseorang berusaha untuk mencari akses kekuasaan politik serta menggunakannya untuk kepentingan mereka.<sup>9</sup> Menurut Hanspeter Kriesi terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan struktur kesempatan politik yaitu :<sup>10</sup>

- a. Struktur kesempatan politik bukan sebuah konsep yang kaku dan konstan karena seringkali mengalami perubahan sebagai hasil kontrol elit baru didalam sistem atau terciptanya konsolidasi elit lama dengan berbagai bentuk yang di modifikasi.

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 67.

<sup>8</sup> Irawati, *Op. Cit.* Hal. 69.

<sup>9</sup> Oman, Sukmana. *Op, Cit.* Hal. 179.

<sup>10</sup> Abdul Wahib Situmorang, *Op. Cit.*, hal. 36

- b. Pertimbangan faktor-faktor struktur kelembagaan formal, informal dan strategi yang dipergunakan oleh para pelaku perubahan.

Struktur kesempatan politik mengacu pada suatu kejadian atau proses sosial yang berfungsi untuk meruntuhkan perhitungan dan asumsi dimana organisasi politik tersebut mampu menstruktur. Dalam hak ini proses sosial yang berjalan dalam waktu relatif lama mampu menghasilkan pergeseran status ganda dalam politik dan memberikan dampak pada struktur kesempatan. Secara umum dapat menggunakan dua pendekatan untuk mengetahui struktur kesempatan politik yaitu:<sup>11</sup>

- a. *Proximate Opportunity Structure*, pendekatan ini lebih menekankan pada signal yang diterima dari kebijakan yang terjadi di lingkungan mereka atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam sumber daya dan kapasitas.
- b. *State Centered Opportunity Structure*, fokus dari pendekatan ini pada negara dan segala elemen yang terdapat didalamnya sebagai sumber-sumber terjadinya peluang yang dapat digunakan sebagai aksi gerakan sosial.

Melalui struktur kesempatan politik Mc Adam menjelaskan bahwa teori struktur kesempatan politik dapat dipergunakan sebagai variabel utama yang berkaitan dengan dua prinsip *variabe dependent*, yaitu momentum aksi kolektif dan hasil dari aktivitas sebuah gerakan.<sup>12</sup> Tarror melihat dalam struktur kesempatan politik, bentuk-bentuk ketegangan politik mengalami peningkatan

---

<sup>11</sup> Oman, Sukmana. *Op, Cit.* Hal. 183

<sup>12</sup> Dipublikasikan dalam Abdul Wahib Situmorang, *Op. Cit.*, hal. 33.

ketika para pelaku perubahan mendapatkan dukungan sumber daya eksternal untuk keluar dari permasalahan dalam rangka mencapai keinginannya.<sup>13</sup>

Mengacu pada pandangan kemunculan gerakan sosial yang kemudian menurunkan beberapa variabel yaitu, pertama, gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. Kedua, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk.<sup>14</sup> Ketiga, ketika elit politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan. Keempat, ketika pelaku perubahan menggalang dukungan para elit yang berada dalam sistem untuk melakukan perubahan. Variabel tersebut dibuat berdasarkan kasus tertentu, untuk tingkat tertentu yang semua variabel bisa digunakan akan tetapi dalam kasus yang lain seringkali dipaksakan apabila seluruh variabel dipergunakan.

Kesempatan politik yang didapatkan tidak hanya menjadi keuntungan dalam gerakan sosial, akan tetapi bisa juga dipergunakan para lawan untuk melemahkan gerakan.<sup>15</sup> Struktur kesempatan bukanlah monopoli gerakan tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok kontra gerakan sebagai sumber kekuatan mereka yang memiliki perbedaan kepentingan. Bisa jadi ketika semakin terbukanya peluang dan akses pada sistem pengambil kebijakan, gerakan sosial semakin terdoda untuk mengadopsi strategi dan terjerumus ke dalam institusi formal. Menurut McAdam terdapat empat dimensi dalam struktur kesempatan politik

---

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 35

<sup>14</sup> Ibid. Hal, 34

<sup>15</sup> Dimpos Manalu, *Op. Cit.*, hal. 27

yang memiliki hubungan secara langsung terhadap eksistensi dari gerakan sosial, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Sejauh mana keterbukaan suatu kelembagaan sistem politik
- b. Kondisi stabilitas hubungan dari berbagai hubungan antar kelompok yang berkuasa
- c. Apakah ada persekutuan antara kekuatan elit dalam masyarakat
- d. Kapasitas serta kecenderungan negara untuk melakukan tindakan represif

Agar tindakan gerakan sosial yang dilakukan berhasil, maka sebuah gerakan harus ada dalam situasi dan tempat dimana faktor-faktor tersebut mendukung.

Kesempatan politik dipergunakan sebagai penjelas dalam melihat sejauh mana yang dilakukan oleh masyarakat dukuh sepat dalam memperjuangkan lahan Waduk Sepat. Hal ini dipergunakan untuk menalkukan tindakan perlawanan dan melihat sejauh mana protes itu berjalan.

## **2. Proses *Framing***

Proses *framing* digunakan dalam studi gerakan sosial yang merujuk pada pemikiran Goffman bahwa proses pembingkaiian merupakan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mereproduksi makna.<sup>17</sup> Snow memberikan makna *framing* sebagai upaya strategis yang disadarkan oleh kelompok gerakan

---

<sup>16</sup> Dipublikasikan dalam Oman Sukmana, *Op.cit.* hal. 182.

<sup>17</sup> Dipublikasikan dalam Oman Sukmana, "*Konsep dan Teori Gerakan Sosial*", *Op. Cit.*, hal. 201



sebagai cara bersama untuk memahami tentang dunia dan posisi diri mereka untuk melegitimasi dan memotivasi suatu gerakan sosial.<sup>18</sup>

Dalam proses *framing* organisatoris gerakan melakukan mobilisasi dengan jalan menggambarkan isu-isu untuk para calon peserta gerakan dengan cara memberikan makna bagi mereka. Organisatoris gerakan dilihat sebagai agenda signifikan yang secara aktif terlibat dalam produksi dan pemeliharaan makna karena secara mendalam terlibat dengan media, pemerintah lokal, negara.<sup>19</sup> Proses *framing* dilakukan untuk memperkuat kesadaran kolektif, keputusan-keputusan strategis sebagai bagian dari gerakan, mempertegas dan memperkuat subjek kontestasi antara aktor gerakan selaku representasi gerakan dengan negara dan para kelompok-kelompok yang berlawanan.<sup>20</sup> *Frame* tindakan kolektif berorientasi aksi dari keyakinan dan makna yang menginspirasi yang merupakan kegiatan sah serta kampanye organisasi gerakan sosial. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya melalui pembentukan *framing* atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Menurut Snow dan Benford, dua komponen penting dalam memframing gerakan yaitu diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan sumbernya dan prediksi elemen sekaligus mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 203

<sup>19</sup> Oman Sukmana, *Op. Cit.*, hal. 206

<sup>20</sup> Irawati, *Op. Cit.* Hal. 70

<sup>21</sup> Dipublikasikan dalam Hasanuddin (2007), "*Jurnal: Dinamika dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial*", Riau: Universitas Riau, hal. 68.



Dalam rangka mencapai sasaran para pelaku gerakan membutuhkan media sebagai alat dalam menjalankan *framing*.<sup>22</sup> Akan tetapi media bukanlah menjadi alat satu-satunya karena proses mempengaruhi yang dilakukan secara langsung menjadi bagian dari gerakan sosial yang dibangun. Strategi gerakan yang dibangun secara langsung maupun tidak langsung dapat dibingkai melebur menjadi satu dalam rangka menanamkan pengaruh.<sup>23</sup> Dalam penelitian gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Sepat, proses *framing* akan digunakan dalam menganalisa tindakan yang dilakukan oleh para organisatoris gerakan dalam membingkai ide-ide yang ada. Sehingga nantinya mudah untuk diinterpretasikan oleh para partisipannya serta menjadi faktor-faktor penggerak utama aksi yang dilakukan.

### 3. Struktur Mobilisasi Sumber Daya

Teori mobilisasi sumber daya ini menyatakan bahwa gerakan sosial muncul karena adanya faktor-faktor pendukungnya, seperti adanya sumber-sumber pendukung, tersedianya kelompok koalisi, adanya dukungan dana, adanya tekanan dan upaya pengorganisasian yang efektif serta sumber daya yang penting berupa ideologi.<sup>24</sup> Teori ini juga menekankan pada permasalahan teknis, bukan pada sebab mengapa gerakan sosial itu muncul. Para penganut teori ini memandang bahwa kepemimpinan, organisasi dan teknik sebagai faktor yang menentukan sukses tidaknya sebuah gerakan sosial.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Wahib Situmorang, Loc. Cit

<sup>23</sup> Loc. Cit

<sup>24</sup> Faqih, Mansour. (2002). Dalam Rojbiyah, Muntobingul. (2012). *Gerakan LSM KOLING Pada Upaya Konservasi Hutan Dieng Tahun 2000-2010*. Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 8, hal : 255

<sup>25</sup> Loc. Cit.

Gerakan sosial banyak diikuti oleh sejumlah individu atau masyarakat yang memiliki tujuan kolektif yang sama, secara bersamaan terlibat dalam aksi kolektif.<sup>26</sup> Gerakan sosial yang merupakan tindakan kolektif secara terorganisir memiliki ruang lingkup yang luas, menggunakan upaya yang jelas, memiliki tujuan, dan menggunakan cara-cara institusional.<sup>27</sup> Bentuk gerakan sosial yaitu kolektivitas yang terorganisasi untuk menghasilkan perubahan sosial sebagai perilaku dalam anggota masyarakat, serta alat ekspresi politik rakyat. Sehingga gerakan sosial menjadi perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok masyarakat yang memiliki dedikasi atau terorganisir.<sup>28</sup> Gerakan sosial memiliki macam teori dan salah satunya adalah mobilisasi sumber daya. Teori ini termasuk dalam kategori gerakan sosial baru apabila terdapat sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional.<sup>29</sup>

Asumsi dasar paradigma mobilisasi sumber daya adalah gerakan yang dilakukan masyarakat dengan sebuah komunikasi dan organisasi yang mumpuni. Hal ini dapat dilihat dari sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional dalam gerakan sosial. Perspektif instrumentalisme dari teori mobilisasi sumber daya dapat dilihat dari teori mobilisasi sumber daya yang berdasarkan pendapat Olson yang menekankan faktor-faktor objektif tertentu sebagai kepentingan, organisasi, sumber daya, strategi dan kesempatan dalam setiap

---

<sup>26</sup> Bert Klandermans, (2005). *Protes : Dalam Kajian Psikologi Sosial* ., Yogyakarta : Pustaka Pelajar,. Hal .14

<sup>27</sup> Soenyono. (2005). *Teori-teori Gerakan Sosial*. Surabaya : Yayasan Kampusiana,. Hal. 2

<sup>28</sup> Ibid. Hal. 6

<sup>29</sup> Rajendra Singh, (2005). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta : Resist Book,. hal. 135

mobilisasi yang dilakukan secara kolektif.<sup>30</sup> Hadirnya ketidakpuasan dan kekecewaan memang diperlukan bagi lahirnya sebuah gerakan sosial, namun hal itu tidak cukup kecuali ketidakpuasan dan kekecewaan berkembang di atas dukungan berbagai sumber daya seperti sumber daya organisasi dan kesempatan untuk melakukan aksi kolektif.

Perspektif mobilisasi sumber daya bekerja didasarkan dengan sebuah sistem relasi sekumpulan asumsi yang terjalin secara aksiomatis. Berikut asumsi-asumsi berdasarkan penjelasan diatas adalah : (1) gerakan sosial harus dipahami dalam kerangka model konflik aksi kolektif, (2) tidak adanya perbedaan yang mendasar antara aksi-aksi kolektif institusioal maupun non-institusional, (3) aksi institusional atau non-institusional berisikan serangkaian konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem relasi kekuasaan yang terlembagakan, (4) gerakan sosial yang melibatkan cita-cita rasional dengan berbagai kepentingan melalui kelompok-kelompok yang saling berkompetisi, (5) tujuan dan penderitaan, konflik dan tandingm semua hadir secara inheren dalam seluruh relasi kekuasaan dan sebagai misal antar mereka sendiri tidak bisa menjelaskan formasi gerakan sosial, (6) formasi gerakan sosial ditentukan oleh perubahan dalam sumber daya organisasi dan kesempatan untuk aksi kolektif, (7) keberhasilan aksi kolektif dilihat dari keuntungan material, (8) mobilisasi orang dalam gerakan sosial kontemporer merupakan hasil dari teknik komunikasi terkini, birokratisasi organisasi dan dorongan serta inisiatif utilitarian. Gerakan sosial muncul karena

---

<sup>30</sup> Olson. (1965) dalam Singh, Rajendra. *Op. Cit.*, hal : 135

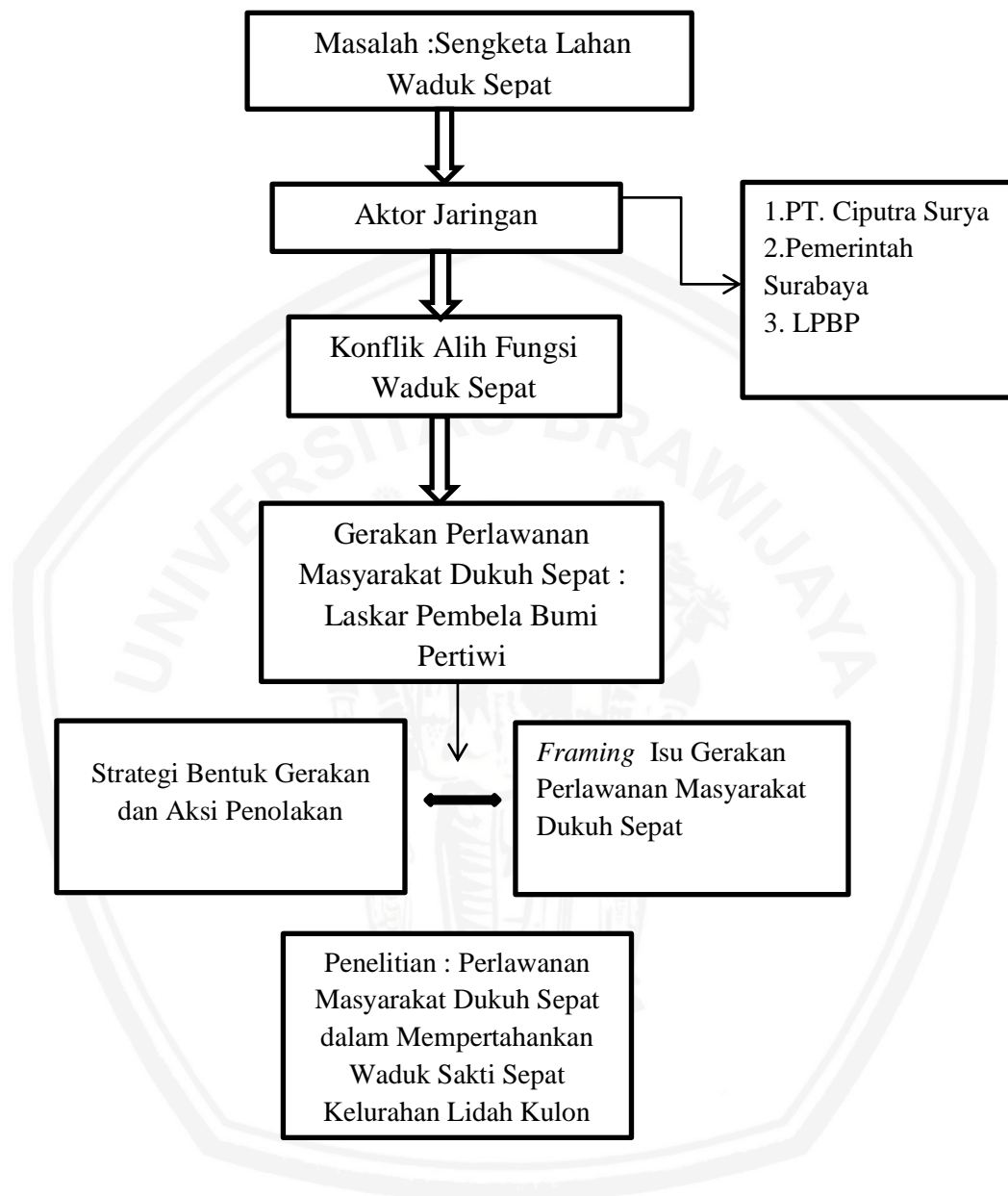
perubahan ketersediaan sumber daya organisasi dan kesempatan untuk tindakan kolektif.

Teori mobilisasi sumber daya berpendapat peningkatan aktivitas gerakan sosial terkait dengan :

1. Pertumbuhan dan dukungan materiil dari yayasan swasta atau lembaga keagamaan
2. Media massa memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah sosial
3. Perkembangan teknologi pencarian dana
4. Munculnya para pengelola karir gerakan sosial yang menolak peran institusi, karir, dan struktur penghargaan yang tradisional
5. Munculnya penerbitan yang mewadahi gerakan sosial
6. Perkembangan organisasi gerakan sosial profesional

Perspektif sumber daya menekankan bahwa gerakan sosial terjadi karena adanya ketidakpuasan massa, kebutuhan, dan kepentingan para pelaku gerakan. Selain itu, perspektif ini berfokus pada kepentingan organisasi dan mempertahankan partisipasi dalam mengembangkan sebuah gerakan sosial. Organisasi ini memiliki peran sentral dalam pertumbuhan gerakan sosial, seperti memobilisasikan sumber daya, mengalokasikan sumber daya, mengembangkan strategi, menciptakan waktu dalam aksi kolektif, dan kontribusi nyata untuk melakukan perubahan. Dalam teori mobilisasi sumber daya, aksi kolektif merupakan cara atau sarana untuk mencapai tujuan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran



Sumber : *Diolah Peneliti (2018)*

Gambar tersebut merupakan gambaran kerangka berpikir penulis yang mencakup bagaimana masalah yang terjadi di Waduk Sepat antara keempat aktor jaringan lalu menimbulkan konflik, strategi gerakan dan *framing* isu yang dihadirkan oleh gerakan yang berpotensi menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana tindakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Sepat terhadap Sengketa Lahan Waduk Sepat. Tindakan yang menimbulkan penolakan dari masyarakat Dukuh Sepat pun selanjutnya berkembang menjadi sebuah aliansi dari masyarakat Dukuh Sepat yaitu Laskar Pembela Bumi Pertiwi dan terus menerus menekan pemerintah dan pihak pengembang untuk meembatalkan alih fungsi tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah cara yang diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai pendekatan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting.<sup>31</sup> Menurut Cathrine Marshall, pendekatan kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.<sup>32</sup>

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.<sup>33</sup> Untuk dapat mendeskripsikan fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha yang mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar mengetahui kondisi dan keadaan yang jelas.

---

<sup>31</sup> Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RND*, Bandung: PT Alfabeta, hlm, 2.

<sup>32</sup> Dipublikasikan dalam Sarwono Jonathan (2013), *Strategi Melakukan Riset (Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan)*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal. 189

<sup>33</sup> Nawawi Hadari (1995), *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, hal. 63.



Pada konteks ini, penelitian menjelaskan mengenai gerakan perlawanan yang dilakukan dalam konflik sengketa lahan Waduk Sakti Sepat Kelurahan Lidah Kulon Surabaya dengan cara menemukan fakta-fakta yang ada dan rinci untuk menggambarkan fenomena dan menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut.

### 3.2. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti ada teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sampling data dengan cara menentukan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan narasumber untuk mendukung terciptanya keakuratan data yang didapat. Dengan demikian peneliti telah memiliki daftar narasumber yang akan dijadikan sebagai narasumber yang akan dijadikan narasumber guna menggali informasi yang dibutuhkan. Subjek penelitian dalam penelitian ini diantaranya : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Jatim), Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP) yaitu gerakan dari masyarakat Dukuh Sepat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian ini meliputi beberapa macam yaitu: (1) Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) Informan Utama merupakan pihak yang terlibat dalam interaksi langsung di lapangan serta mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (3) Informasi Tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terliha langsung dalam interaksi sosial politik yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci, informan utama

1. Informan Kunci (*Key Informan*), dalam penelitian ini adalah

- Rochim, Ketua LPBP atau Laskar Pembela Bumi Pertiwi. Pemilihan Bapak Rochim ini sebagai informan kunci karena ketua LPBP ini merupakan informan yang dianggap oleh penulis memberikan informasi paling lengkap dan juga mendasar. LPBP ini dibentuk oleh masyarakat Dukuh Sepat yang sangat mempertahankan Waduk Sepat ini.

2. Informan Utama, dalam penelitian ini adalah

- Dian Purnomo, sekretaris LPBP. Pemilihan Dian Purnomo ini sebagai informan yang dianggap oleh penulis memberikan informasi yang paling lengkap dan juga mendasar. Dian Purnomo berperan langsung dalam setiap aksi yang dilakukan oleh LPBP dan sering melakukan audiensi atau *hearing* di setiap acara diskusi.

3. Informan Tambahan, dalam penelitian ini adalah

- Habibi, tim advokasi Lembaga Bantuan Hukum. Pemilihan Bapak Habibi sebagai informan yang dianggap oleh penulis memberikan informasi yang paling lengkap. Selain itu juga masuk dalam tim pengadvokasian perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat.
- Mulyani, warga Dukuh Sepat. Pemilihan Ibu Mulyani sebagai informan yang dianggap oleh penulis memberikan informasi yang lengkap.

Pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan informan ini disebut *purposive*, dimana pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut adalah orang

yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan ataupun kemungkinan dia adalah pengusaha yang nantinya akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Dengan beberapa hambatan yang terjadi saat penulis melakukan penelitian, pihak Pemerintah Kota dan Pihak Pengembang menolak untuk melakukan wawancara. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa masalah ini sangatlah riskan untuk dibicarakan terhadap orang asing yang mengetahui lebih dalam mengenai konflik ini. Sehingga mereka tidak bisa memberikan informasi secara terbuka dan mendalam terhadap orang-orang yang mereka anggap asing meskipun penulis sudah menyertakan surat izin resmi dari Universitas Brawijaya, oleh karena itu ada hambatan tersebut yang melatar belakangi penulis dalam penentuan informan-informan diatas.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

1. Wawancara Mendalam ( *Depth Interview* )

Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang terstruktur kepada responden. Sehingga untuk dapat berhasil dalam melakukan wawancara, seorang *interviewer* harus mengetahui dan paham tujuan dan maksud

penelitian, menguasai konsep, serta materi dan pertanyaan yang ingin ditanyakan dan terwawancara (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>34</sup>

## 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan. Observasi melakukan pengamatan/ peninjauan secara cermat tujuannya agar terbentuknya pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan ataupun kejadian-kejadian yang dijelaskan atau bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Penelitian ini cukup banyak menjadikan bahan observasi sebagai data penelitian.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, dimana dokumen merupakan catatan baik berbentuk catatan dalam bentuk kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) dan berupa buku, artikel media massa, catatan, undang-undang, notulen, halaman web, foto, laporan kegiatan dan lain-lainnya.<sup>35</sup> Dan nantinya pada beberapa kali informan akan memberikan arsip atau artikel yang pernah dibuat mengenai informasi internal institusi maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai ketika peneliti mengurutkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk dapat dijadikan hipotesis kerja. Data yang diperoleh dari

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong (2005), *Op. Cit.*

<sup>35</sup> Samoji Sarosa (2012), *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT. Indeks, hal. 61.

hasil diskusi dan wawancara yang dikelompokkan melalui penyederhanaan ke dalam bentuk yang mudah dibaca, yaitu sub bab pembahasan penelitian. Analisis data dilakukan dalam suatu proses yang dimulai sejak pengumpulan data dilakukan sampai data yang dibutuhkan telah tercukupi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan umum dalam mengolah data yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data ini juga menggunakan teori-teori yang relevan dengan bahan penelitian dan data yang ditemukan di lapangan dengan bantuan pedoman pertanyaan penelitian. Dengan teknik analisis data kualitatif ini, maka dapat didekripsikan secara jelas mengenai permasalahan penelitian yaitu aspek-aspek yang mendorong perlawanan serta pola perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Sepat.

### **3.5. Keabsahan Data**

Keabsahan data pada proses penelitian ini berlangsung baik pada hal terjun langsung ke lapangan maupun pada proses analisis data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji validitas penelitian ini. Triangulasi metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dalam memenuhi keabsahan data ini teknik ini diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WADUK SEPAT

#### 4.1. Kelurahan Lidah Kulon

Lidah Kulon merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Lakarsantri. Wilayah ini berada di kawasan Surabaya bagian barat yang berbatasan dengan Kecamatan Menganti Gresik. Secara administratif, Kelurahan Lidah Kulon memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep
Sebelah Timur	: Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri
Sebeah Selatan	: Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri
Sebelah Barat	: Keluarahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri

Kelurahan Lidah Kulon memiliki luas wilayah sekitar 385.278 Ha. Wilayah Kelurahan Lidah Kulon meliputi 8 Rukun Warga (RW) dan 53 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Lidah Kulon terletak di ketinggian 5 meter dari permukaan laut, dan banyaknya curah hujan 500 mm/tahun. Topografi kelurahan ini termasuk dataran rendah dengan suhu minimum 32° C. <sup>36</sup> Wilayah desa yang seluas 385 ha/m<sup>3</sup> ini dibagi menjadi dua yaitu Krajan (Lidah Kulon) dan Perdukuhan (Sepat). Daerah penelitian akan difokuskan pada perkampungan penduduk yaitu kawasan Perdukuhan Sepat yang membujur dari timur ke barat. Di sebelah utara perkampungan ini terdapat tanah tegalan dan sebagian kecil lahan sawah yang letaknya lebih tinggi dari pemukiman penduduk. Kemudian di sebelah selatan

---

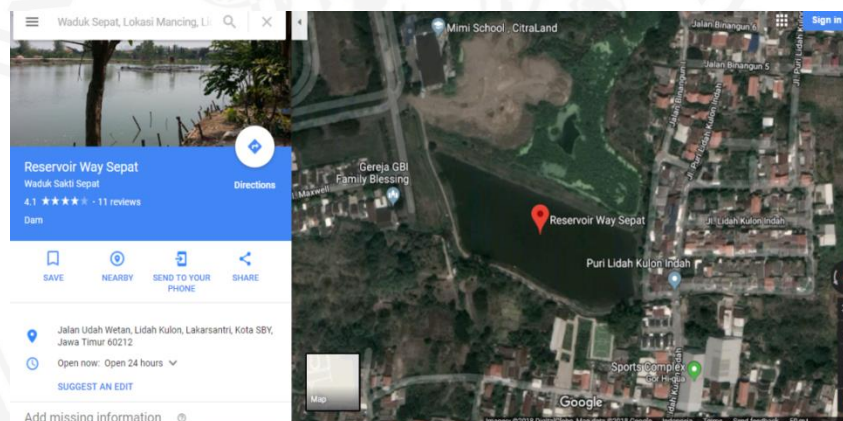
<sup>36</sup> Data Monografi Kelurahan Lidah Kulon



perkampungan rata-rata masih berupa lahan sawah tadah hujan dan sebagian kecil lagi tanah tegalan yang ketinggiannya lebih rendah dari pemukiman penduduk.

Di sebelah utara Desa Lidah Kulon yang berbatasan dengan Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bangkingan, di sebelah timur dengan Kelurahan Jeruk dan di sebelah barat dengan Kelurahan Lidah Wetan yang seluruhnya masih termasuk dalam lingkaran Kecamatan Lakarsantri. Jarak antara kantor Kelurahan Lidah Kulon dengan kantor Kelurahan Lidah Kulon dengan kantor Kecamatan Lakarsantri kurang lebih 3 km.

**Gambar 4.1 Peta Waduk Sepat**



Peta Waduk Sepat  
Sumber : Google Maps, 2018

Sementara di sebelah utara Perdukuhan Sepat terdapat waduk yang diberi nama Waduk Sepat atau Waduk Sepat Sakti. Waduk ini memiliki luas 6,675 ha/m<sup>3</sup>, dibuat di atas pemukiman penduduk dan di area tanah tegalan. Tingginya kurang lebih 3 meter dari pemukiman penduduk dan kedalamannya dibuat miring dan memanjang dari utara ke selatan. Di tanggul selatan waduk, sebelah baratnya diberi pintu air, dimana sekitar 5 meter dari pintu air tersebut ditanami

pohon jatilondo yang dikeramatkan oleh penduduk. Kemudian kurang lebih 20 meter dari pintu air masih ada galian sumur yang juga dikeramatkan oleh warga yang diberi nama sumur kali. Di sebelah barat waduk juga terdapat makam yang dikeramatkan penduduk, yaitu makam sejarah Mbah Cokro dan Mbah Dewi.

Bentuk waduk di sebelah utara dibuat mengerucut dan di ujung utara sisi timur mengalir kali dari area tegalan yang merupakan sumber air waduk. Kedalaman waduk dibentuk miring ke selatan, lalu di sisi barat dan timur tanggul terdapat akses jalan untuk hewan ternak milik para petani. Setengah dari lahan waduk di bagian utara digunakan untuk lahan persawahan karena lebih dangkal. Sedangkan setengah lahan lagi di bagian selatan waduk digunakan sebagai tempat penampungan air hujan karena lebih dalam.

Sejak adanya konflik dan perlawanan warga kepada pengembang Citraland, wajah Waduk Sepat mulai mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Di sekeliling batas waduk dipatok-patok oleh bambu runcing yang diberi bendera merah putih di atasnya. Di sudut-sudut sisi waduk juga dipasang oleh spanduk-spanduk yang bertuliskan cat merah yang isinya menentang penggusuran waduk, juga boneka orang-orangan yang menjadi simbol perlawanan warga kepada pengembang. Di sisi utara waduk dekat jalan masuk waduk terdapat pos-pos penjagaan atau pondok-pondok sederhana dari bambu yang sudah dilengkapi dengan aliran listrik dan *sound system*. Di dekat pondok-pondok ini terdapat beberapa warung sederhana yang digunakan warga untuk berjualan makanan serta minuman, juga mushola sebagai tempat beribadah.

Dahulu saat kasus pemagaran sering kali terjadi dan menjadi isu yang hangat di tengah masyarakat, tempat ini sangat ramai dari sore hingga malam hari oleh warga mayoritas RW III dan RW V Perdukuhan Sepat Surabaya yang melakukan penjagaan di sekitar waduk. Tenda-tenda keprihatinan banyak didirikan dari bambu, tikar dan terpal sebagai tempat berkumpulnya warga yang bergantian menjaga waduk dari upaya pemagaran yang semakin ramai pada malam hari. Namun saat ini keadaan waduk pada malam hari telah kembali sepi, tidak seramai sebelumnya sebab sudah memasuki musim penghujan dan dalam waktu dekat ini belum ada lagi tanda-tanda pemagaran waduk dari pengembang. Waduk biasanya menjadi ramai pada hari minggu atau hari libur dari pagi hingga malam hari oleh para pemancing yang melakukan hobinya di tempat ini.

Menurut keterangan warga, akibat pemagaran tanggal 14 Desember 2011, pada beberapa titik di kawasan waduk kini mulai mengalami kerusakan seperti longsor terutama di sisi utara karena keberadaan alat-alat berat yang masuk. Pohon-pohon trembesi yang ditanam oleh warga juga rusak terkena alat berat padahal tingginya sudah hampir selutut orang dewasa. Perlawanan keras dari warga tersebut membuat pemagaran tidak dilanjutkan. Menurut pengamatan peneliti, situasi dan kondisi waduk masih berada dalam pemagaran dari pihak pengembang. Situasi dan kondisi lokasi penelitian dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari pergerakan yang dilakukan oleh kedua pihak baik dari pihak pengembang PT. Ciputra Surya Tbk maupun masyarakat setempat.

#### 4.1. Sejarah Desa dan Waduk Sepat

Desa Lidah Kulon tepatnya di Perdukuhan Sepat disinyalir sudah ada sebelum tahun 1945, yaitu sejak jaman penjajahan Belanda. Nama Perdukuhan Sepat konon diambil dari pohon sepat yang dulu tumbuh di daerah tersebut, namun keberadaannya kini sudah hampir punah karena banyak ditebang oleh penduduk sekitar. Penduduk desa dahulu hidup dengan bercocok tanam guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, menjadi buruh tani dan memelihara hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi, kerbau, sebagai usaha sampingannya. Para petani umumnya menggunakan pola tanam tumpang sari yaitu palawija dan padi. Lahan pertaniannya berupa sawah tadah hujan dan tegalan. Kultur tanah di daerah ini terbilang keras maka hasil pertanian tidak bisa maksimal, sehingga dahulu banyak penduduk yang kekurangan pangan. Desa ini juga terkenal sebagai daerah yang kesulitan air, sehingga kebutuhan air bergantung dari air hujan yang tergenang di kali, sawah, palung sawah, *babakan* (tempat mandi) dan *jublangan* (tandon air dari lahan galian) yang ada di tegalan milik warga.

Desa Lidah Kulon (Perdukuhan Sepat) dulunya merupakan daerah yang kekeringan dan kesulitan air bersih. Dalam memenuhi kebutuhan air penduduk, seperti mandi, mencuci pakaian, memasak, minum, serta mengairi lahan pertanian, seluruhnya bergantung dari air yang bersumber pada tadah hujan. Dahulu di belakang pekarangan rumah penduduk rata-rata terdapat lahan galian (*jublangan*) yang digunakan untuk tadah hujan (tandon air), sebagai persediaan air terutama di musim kemarau. Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan air

bersih pun semakin sulit didapatkan. Sehingga atas prakarsa para sesepuh pada masa itu warga desa sepakat untuk bergotong royong membuat waduk, kali, telaga dan sumur.

Waduk dibuat di jaman pemerintahan Belanda ketika Kepala Desa Darmina masih berkuasa pada masa itu. Sebelum pembuatan waduk dilaksanakan, di wilayah desa sudah ada dua *babakan* atau tempat mandi yang berbentuk lahan galian (*jublangan*), yaitu *babakan lanang* (tempat mandi laki-laki) dan *babakan wedok* (tempat mandi perempuan). Warga desa di masa itu terbiasa untuk mandi di tempat tersebut. Kemudian ketika sedekah bumi tiba, *babakan* itu juga digunakan sebagai tempat mandi *tandak* (sinden) yang mengisi kegiatan ritual sedekah bumi. Waduk dibangun dari tanah para petani yang diambil sebagian secara merata yang diberikan dengan sukarela. Pada masa itu status lahan petani hanya sebatas pengakuan warga setempat dan tidak ada surat hak milik. Batas tanah terpetak-petak dan dibatasi dengan pohon hidup seperti pohon jaranan, trembesi, atau randu.

Waduk dibuat dengan cara menggali yang oleh warga desa disebut *gugur gunung* (kerja bakti), dimana pembagian kerjanya dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Warga sinoman (pemuda/karang taruna)
2. Warga angguran (warga yang tidak mempunyai lahan garapan pertanian)
3. Warga grogol (warga yang mempunyai lahan garapan pertanian)



Warga sinoman dan angguran mengerjakan atau menggali waduk sebesar satu bagian yakni 2 m<sup>3</sup>, sedangkan warga gogol sebesar dua bagian yakni 4 m<sup>3</sup>. Penggalan waduk dikerjakan secara bergilir dengan teratur dan sukarela tanpa mengharapkan upah atau gaji.

Tujuan dari pembuatan waduk selain untuk persediaan air warga yang kesulitan air bersih, juga untuk berbagai keperluan lain. Waduk digunakan sebagai penanggulangan banjir di musim penghujan, mengairi lahan pertanian warga, memenuhi kebutuhan mandi dan mencuci pakaian, serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri (*angguran*). Pengelolaan waduk secara spesifik terbagi sebagai berikut, setengah bagian utara dipetak-petak untuk lahan pertanian pemuda pengangguran (*angguran*) dan dipergunakan secara bergilir (*gogol gilir*). Sementara setengahnya lagi di bagian selatan untuk persediaan air di musim kemarau. Di tanggul selatan waduk bagian barat diberi pintu air, agar bisa dialirkan di lahan pertanian warga lewat kali sampai ke palung sawah (*balong*), kali cilik (*kali cacing*), hingga ke kali gede (*kali kundang/kali makmur*).

Selain waduk, warga juga membuat sumur, telaga dan kali untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Apabila dahulu waduk dimanfaatkan untuk mandi, mencuci pakaian, mengairi lahan pertanian, minum hewan ternak, maka sumur dan telaga digunakan lebih untuk kebutuhan air minum dan memasak. Sedangkan kali banyak dipergunakan untuk irigasi sawah-sawah warga. Pembuatan sumur, telaga dan kali ini hampir mirip dengan proses pembangunan waduk, yaitu atas swadaya murni warga desa. Terutama untuk kali, tanahnya diambilkan dari tanah petani



pada masa itu yang dikenal sebagai tanah *cuilan*. Kali yang dibuat oleh warga antara lain adalah kali cilik, kali jorongan, kali cacing dan kali balong. Kali-kali ini terletak di area persawahan dan memotong lahan perkampungan secara memanjang dan bercabang dari pintu air waduk sampai ke persawahan milik warga. Sementara sumur dan telaga sendiri meski saat ini sudah tidak terpakai lagi, namun keberadaannya masih dijaga dengan baik dan dikeramatkan oleh warga. Ketika warga akan mengadakan hajatan, umumnya memberi sesaji dan dupa di tempat-tempat yang dikeramatkan tersebut. Selain itu warga juga percaya jika ada orang yang berbuat hal yang tidak baik di sumber-sumber air itu, misalnya seperti buang air kecil atau meludah konon akan terkena *bala* (ganjaran) yaitu sakit atau tidak bisa berdiri. Sumur dan telaga itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sumur kali, terletak di tengah-tengah antara waduk dan makam Mbah Cokro dan Mbah Dewi.
2. Sumur windu, terletak di pinggir jalan Raki yang kini dikenal sebagai jalan Wisma Lidah Kulon. Di lokasi ini juga terdapat pohon beringin yang dikeramatkan oleh warga, sampai saat ini tidak ada yang bisa menebang pohon tersebut. Padahal pohon ini sudah berulang kali akan ditebang oleh pengembang namun selalu gagal. Warga mempercayai ada kekuatan gaib di dalamnya sehingga pohon ini masih ada sampai sekarang.

3. Sumur kola, terletak di samping jalan Kola yang sekarang menjadi jalan Puri Lidah Kulon. Sumur ini sudah tidak ada, bekasnya kini telah menjadi Balai RW III untuk warga Perdukuhan Sepat.
4. Sumur kesambi, terletak di sebelah utara wilayah Perdukuhan Sepat RW III di bawah pohon kesambi yang menjadi cikal bakal nama sumur tersebut.
5. Sumur lani, terletak di sebelah selatan makam Mbah Cokro dan Mbah Dewi di lahan milik Bulani.
6. Telaga, terletak di belakang Balai RW V yang sampai saat ini masih ada keberadaannya.

#### **4.2. Penduduk**

Desa Lidah Kulon berdasarkan data monografi Kelurahan pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sebesar 14.360 jiwa, yang terdiri dari 7195 laki-laki dan 7169 perempuan. Jumlah penduduk desa berdasarkan umur mulai dari 0-12 bulan adalah tidak ada, umur 1-5 tahun adalah 11568 orang, umur 7-15 tahun adalah 2335 orang, 15-56 tahun adalah 1484 orang, dan umur lebih dari 56 tahun adalah 1412 orang. Kepadatan penduduk desa seluruhnya adalah 7622 KK, sedangkan untuk Perdukuhan Sepat RW III dan RW V sendiri terdapat kurang lebih 1500 KK.

Desa Lidah Kulon terbagi ke dalam 8 Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT), dimana yang menjadi fokus penelitian adalah warga yang tinggal di Perdukuhan Sepat Desa Lidah Kulon Surabaya. Perdukuhan Sepat terbagi ke dalam 2 RW yakni RW III dan RW V dimana masing-masing RW terbagi lagi ke

dalam 6 RT. Menurut keterangan warga, 90% penduduk RW III dan RW V masih merupakan penduduk asli, hanya sedikit pendatang yang ada di daerah ini. Mayoritas warga beragama Islam, selain itu agama lain yang ada adalah agama Kristen, Katolik, dan aliran kepercayaan Sapta Darma. Kepercayaan ini masih eksis dan memiliki pengikut sekitar kurang lebih 50 orang, tempat peribadatannya disebut dengan *sanggar* yang terletak di wilayah RW III.

#### 4.3. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Lidah Kulon terutama di kawasan Perdukuhan Sepat RW III dan RW V rata-rata bermata pencaharian di bidang pertukangan (bangunan), buruh dan perdagangan (toko). Saat ini mata pencaharian penduduk telah bergeser, warga tidak lagi banyak bergerak di bidang pertanian seperti di masa penjajahan Belanda. Meski masih terdapat beberapa orang yang berprofesi sebagai petani, namun jumlahnya tidak begitu banyak seperti dulu. Menurut data monografi kelurahan sampai tahun 2011, jumlah total penduduk yang bekerja di Kelurahan Lidah Kulon sampai tahun 2011 adalah 2566 orang.

Penduduk Desa Lidah Kulon paling banyak merupakan pensiunan baik ABRI maupun sipil sejumlah 1642 orang. Kemudian diikuti dengan PNS sejumlah 355 orang, anggota ABRI 279 orang, dan lain-lain 187 orang. Sementara mata pencaharian lain pada masyarakat Lidah Kulon adalah guru sebanyak 49 orang, dokter 20 orang, bidan 9 orang, pegawai kelurahan 7 orang, pemilik kios 6 orang, pemilik warung 5 orang, pegawai jasa keuangan 3 orang, pemilik toko 2 orang, dan pedagang pasar 2 orang. Dari wawancara penduduk terutama yang tinggal di RW III dan RW V banyak warga yang bekerja di bidang

pertukangan/bangunan dalam proyek-proyek milik pengembang. Contohnya seperti proyek perumahan, perkantoran, dan lain sebagainya.

#### 4.4. Kesenian

Kesenian yang menonjol di desa ini adalah *tayub* atau lebih dikenal warga sebagai *tandaan* dan ludruk. Kesenian ini biasanya terdapat pada ritual *sedekah bumi* yang rutin diadakan warga desa setiap satu tahun sekali. Tanggal pelaksanaan sedekah bumi ini tidak pernah sama setiap tahunnya, pada tahun 2011 sedekah bumi diadakan di bulan September. *Sedekah bumi* ini dulunya merupakan wujud syukur para petani terhadap hasil panen yang mereka dapatkan. Meskipun saat ini jumlah petani di daerah ini tidak lagi sebanyak dulu, namun ritual sedekah bumi masih tetap dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestariannya. Ritual *sedekah bumi* ini dimulai dari pagi hingga malam hari dan diikuti hampir seluruh warga desa dengan melibatkan tempat-tempat yang dikeramatkan oleh warga setempat. Ritualnya dimulai dari berdoa di Balai RW III yang dahulunya merupakan sumur kola, lalu telaga, baru yang terakhir yaitu sumur windu.

Dalam ritual ini para penari yang dipanggil dari kesenian *tandaan* akan mengelilingi tempat-tempat keramat tersebut. Ritual ini ditutup dengan acara *tumpengan* dan hiburan ludruk. Selain itu juga terdapat ritual *sedekah waduk* yang merupakan pengembangan dari sedekah bumi, sebagai upaya warga dalam

mempertahankan waduk dari ekspansi pengembang. Ritual dalam sedekah waduk ini mirip dengan sedekah bumi pernah dilakukan sekitar bulan Juni tahun 2011.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Data Monografi Kelurahan Lidah Kulon tahun 2011 dan Kronologi Waduk Sepat Lidah Kulon Surabaya tahun 2011.

## BAB V

### GERAKAN PERLAWANAN LASKAR PEMBELA BUMI PERTIWI

#### 5.1. Konflik Waduk Sepat

Ruang merupakan tempat yang memiliki unsur sejarah maupun sosial budaya. Ruang dapat dikatakan sebagai bagian dari hidup masyarakat, dalam menata ruang tidak hanya dilihat atau diukur seberapa lebar dan luas ukuran ruangnya. Salah satu unsur pengelolaan ruang adalah dengan adanya partisipasi dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat tidak memiliki jiwa keinginan dalam berpartisipasi menata ruang maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak adanya unsur demokrasi. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang besar bagi keberhasilan pengelolaan ruang, salah satunya adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya yang *notabenya* sebagai salah satu kota besar yang sedang mengalami masalah penyempitan ruang terbuka bagi masyarakat. Hal ini dapat dikatakan karena banyak ruang-ruang yang kegunaan awalnya sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi bangunan-bangunan seperti perumahan elite maupun gedung-gedung tinggi pencakar langit.

Salah satu contohnya adalah Dukuh “Sepat” yang terletak di Kota Surabaya bagian Barat. Nama ini diambil dari banyaknya jumlah ikan sepat yang berada di daerah waduk tersebut, sehingga Dukuh Sepat ini memiliki keterikatan yang kuat dengan keberadaan waduk sepat sendiri. Hal inilah yang dinamakan sebuah sejarah ketika kita mengenal dan mengetahui pengelolaan ruang yang ada di kehidupan masyarakat. Hal ini diibaratkan ketika ada waduk sepat berarti ada juga Dukuh Sepat, tetapi jika Waduk Sepat sudah tidak ada maka nama Dukuh Sepat



sendiri namanya akan berubah menjadi yang lain karena Waduk Sepat merupakan ikon yang ada di perdukuan tersebut.

Salah satu daerah ini memiliki permasalahan mengenai konflik tentang Waduk Sepat yang ada di perdukuan sepat kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya. Kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2004, pada saat muncul isu yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat mengenai Perda Baru yang membahas tentang Tanah Kas Desa (*Bondho Deso*), TKD ini semuanya akan ditarik oleh pihak Pemerintah Kota. Setelah adanya isu tersebut warga melakukan pertemuan antara RW 3 dan RW 5. Ketika diadakan pertemuan, masyarakat diarahkan untuk melepaskan waduk sebelum terjadi dari pihak Pemerintah Kota. Berawal dari pertemuan tersebut masyarakat merasa kecewa dan melakukan penolakan-penolakan. Tindakan penolakan berawal dari pemilihan panita yang diunjuk untuk mengurus persoalan aset desa yang hilang, tim dari panitia sendiri ini menjelaskan bahwa jika terjadi tukar guling maka nantinya akan mendapat ganti rugi sebagian dari hasil tersebut. Selain itu panitia juga lebih sering melakukan intimidasi kepada masyarakat agar mereka bersedia untuk melepaskan waduk. Namun pemilihan panitian tersebut dirasa tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada karena pembentukan panitia tersebut tanpa ada sepengetahuan dari pihak masyarakat lainnya. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin curiga terhadap panitia dan rencana tentang pelepasan waduk tersebut. Sehingga dari masalah tersebut akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara panitia dan masyarakat. Masyarakat Dukuh Sepat takut bahwa nantinya kegiatan tersebut

hanya akal-akalan dari pihak Pemerintah Kota dan pihak pengembang untuk memaksa mereka melepaskan tanah waduk tersebut.<sup>38</sup>

Pertemuan ini sempat terhenti beberapa kali karena tidak menemukan jalan keluar. Lalu kasus ini muncul kembali pada tahun 2010, saat itu pihak kelurahan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kota menyediakan dana yang berkisar sekitar 6 Miliar. Dana tersebut secara cuma-cuma dapat diambil oleh masyarakat. Namun sebagian besar warga menolak, karena masyarakat khawatir bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan pelepasan waduk mengingat bahwa sebelumnya sempat terjadi perbincangan tentang pelepasan waduk dan ditakutkan bahwa uang tersebut adalah sebagai ganti rugi kepada masyarakat terhadap pelepasan waduk.<sup>39</sup>

Pihak kelurahan pun menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan dana tersebut. Dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota merupakan murni dana CSR yang diberikan Pemerintah Kota yang memang wajib diberikan kepada masyarakat dari sebuah perusahaan, tetapi pihak masyarakat tetap menolak. Hingga akhirnya Lurah yang awalnya mengetahui persoalan ini pun di pensiunkan. Masyarakat sekitar sempat mengira bahwa Lurah tersebut di pensiunkan karena tidak berhasil membuat masyarakat setuju dengan menerima dana tersebut. Hingga akhirnya posisi Lurah tersebut digantikan dengan Lurah yang baru.<sup>40</sup>

Konflik pun berlanjut ketika munculnya surat keterangan dari kelurahan kepada warga bahwa Waduk Sepat telah berpindah status kepemilikannya

---

<sup>38</sup> Rochim. Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>39</sup> Rochim. Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>40</sup> Rochim. Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

menjadi milik pengembang yaitu PT. Ciputra Surya, Tbk. Munculnya SK tersebut membuat warga semakin emosi karena Pemerintah Desa dianggap tidak mengikutsertakan warga disana dalam proses tersebut. Warga melakukan protes ke kelurahan namun pihak kelurahan tidak melakukan tindakan apapun untuk membantu masyarakat setempat yang tidak setuju dengan keputusan SK tersebut.<sup>41</sup>

Pada tahun 2010 adanya pengosongan secara paksa lahan Waduk Sepat tersebut. Pihak Ciputra dan aparat melakukan pemagaran pada akses utama waduk. Sehingga masyarakat saat ini telah kehilangan waduk yang selama puluhan tahun ini dijaga oleh warga. Para warga pedukuhan sepat saat ini hanya bisa melihat kondisi waduk dari lubang yang ada di dinding pembatas tersebut. Warga terus melakukan upaya demi upaya untuk menyelamatkan keutuhan waduk tersebut.<sup>42</sup>

Tahun 2011 masyarakat masih harus dipaksa untuk menyetujui pemberian dana CSR tersebut namun salah satu warga meminta surat perjanjian yang dibuat untuk penjelasan ini agar masyarakat bisa percaya jika memang hal ini tidak ada kaitannya dengan pelepasan waduk. Namun daripihak kelurahan tetap mengalihkan dan mencoba meyakinkan masyarakat bahwa dana CSR ini tidak ada hubungannya dengan pelepasan waduk.<sup>43</sup>

Surat SK muncul dan masyarakat akhirnya mengetahui mengenai pelepasan waduk ini. Masyarakat menganggap bahwa bukan seberapa tinggi ganti rugi yang didapatkan oleh masyarakat tetapi bagaimana masyarakat tetap mempertahankan

---

<sup>41</sup> Rochim. Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>42</sup> Video Dokumenter Waduk Sepat

<sup>43</sup> Rochim. Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

waduk menjadi sebagaimana mestinya. Pada saat itu panitia dibentuk sebanyak 16 orang dan panitia ini diambil secara *random* bukan pilihan dari RT maupun RW dan bukan juga dari seseorang yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Setelah terbentuknya panitia 16 ini sempat terjadi pemaksaan pembagian uang tetapi masyarakat menolak. Pada saat itu masyarakat ingin melakukan diskusi bersama pihak Pemerintah Kota dan menanyakan secara langsung tentang persoalan yang terjadi. Namun pada keesokan harinya warga yang akan berangkat ke Pemerintah Kota mendapat panggilan di balai RW 3.<sup>44</sup>

Masyarakat Dukuh Sepat ingin bertemu pihak Pemerintah Kota untuk membuktikan bahwa Waduk Sepat bukanlah bekas waduk melainkan aset desa yang masih aktif sesuai dengan fungsinya. Namun pada saat kemarin memang kondisi saat itu waduk tersebut sedang ditumbuhi air, sehingga terlihat tidak terawat. Masyarakat tetap mempertahankan lahan tersebut karena masyarakat mempunyai pegangan yang tinggi bahwa waduk tersebut sebelumnya memang digunakan untuk kebutuhan bersama antara warga dan PT. Ciputra Surya.<sup>45</sup> Waduk ini dijadikan tempat untuk menampung pembuangan air dan air hujan, jadi ketika terjadi hujan yang terus menerus dan kondisi air telah penuh maka pintu arus air akan dibuka agar bisa mengalir. Adanya perjanjian dengan bersama-sama untuk menjaga kebersihan waduk, namun yang terjadi bahwa pihak pengembang membiarkan tumbuhan liar tumbuh dengan sendirinya disekitaran waduk tersebut.

---

<sup>44</sup> Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>45</sup> Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

Sehingga masyarakat yang melakukannya sendiri dan bergotong royong untuk membersihkan waduk saat itu.<sup>46</sup>

Sebelumnya adanya Surat Keterangan yang keluar, waduk ini posisinya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ketika surat yang telah dikeluarkan, bahwa waduk tersebut menjadi “bekas waduk”. Waduk tersebut digunakan sebagai irigasi dan berguna untuk penampungan air hujan agar tidak mengalami banjir ketika musim hujan tiba. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi semakin tinggi untuk mempertahankan waduk yang telah menjadi ikon dari perdukuan sepat ini karena adanya ketimpangan antara SK dan realita di lapangan.<sup>47</sup>

## **5.2. Terbentuknya Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP)**

Masyarakat pada saat ini sering mendapatkan perlakuan intimidasi ketika akan memasuki kawasan Waduk Sepat. Dulunya, selama berbulan-bulan hampir setiap hari terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pekerja Citraland hingga masyarakat Dukuh Sepat sendiri pun berinisiatif untuk melakukan diskusi ke Komisi A DPRD Surabaya namun dari pihak DPRD Surabaya sendiri tidak ada balasan. Tidak adanya balasan dari DPRD, masyarakat yang dulunya belum mempunyai wadah untuk melakukan perlawanan dan mempertanyakan persoalan hukum tentang masalah ini akhirnya melakukan musyawarah dan kemudian terbentuknya Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP). LPBP ini adalah awal mula

---

<sup>46</sup> Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>47</sup> Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

wadah dari masyarakat untuk mulai berani melakukan demonstrasi di kelurahan pada saat itu.<sup>48</sup>

Awal mula terbentuknya LPBP ini muncul dari inisiatif masyarakat setempat untuk mempermudah ketika ingin melakukan aksi-aksi untuk mempertahankan Waduk Sepat tersebut. Nama LPBP merupakan usulan dari Bapak Rochim yang merupakan ketua dari lembaga tersebut oleh masyarakat. LPBP merupakan tempat untuk berkumpul dari para warga Dukuh Sepat dan berguna untuk bertukar pikiran agar masyarakat dapat membatasi aksi dan tidak bertindak kelewat batas. Uniknya dalam lembaga ini banyak kaum ibu-ibu yang mengikutsertakan dirinya untuk mengikuti aksi pada saat itu. Dibentuknya LPBP ini membuat jaringan masyarakat semakin meluas dan terhubung dengan beberapa pihak LSM yang lain. Masyarakat Dukuh Sepat sendiri diberikan ilmu-ilmu mengenai tentang politik, hukum, dan juga penguatan tentang mental ketika mereka akan diintimidasi oleh pihak pengembang. Bergabungnya beberapa LSM membuat masyarakat merasa senang dengan hadirnya LSM ini karena sangat bisa membantu dan mengawal pihak masyarakat dalam aksi.<sup>49</sup>

Dalam permasalahan ini perlahan-lahan masyarakat Dukuh Sepat ini memahami sedikit demi sedikit apa yang ingin mereka lakukan. Aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak langsung dilaksanakan tetapi pihak LPBP dan masyarakat sendiri merapatkan kegiatan yang ingin mereka lakukan pada 2 hingga 3 hari sebelumnya agar tidak ada kecurigaan dari beberapa pihak yang kontra terhadap mereka. Pada kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah Bapak

---

<sup>48</sup> Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>49</sup> Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018



Rochim selaku Ketua LPBP sendiri agar tidak didatangi oleh pihak yang kontra kepada mereka, rumah Bapak Rochim sendiri biasanya memang digunakan untuk berkumpul ketika mereka ingin melakukan aksi tersebut.<sup>50</sup>

### 5.3. Perlawanan Warga Dukuh Sepat

Menurut Scott, perlawanan sebagai tindakan yang dilakukan oleh sekelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau mengklaim, misalnya harga sewa atau harga pajak yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka.<sup>51</sup> Scott membagi perlawanan menjadi dua bagian, yaitu perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup. Perlawanan terbuka dapat berupa aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, aksi mogok makan dan lain-lainnya yang merupakan konsekuensi logis dari perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.<sup>52</sup> Sedangkan perlawanan tertutup, dimana perlawanan tertutup bersifat tidak teratur, terjadi individual, bersifat opportunistik, dan mementingkan diri sendiri. Jenis perlawanan tertutup ini biasanya dilakukan misalnya berpura-pura patuh tetapi dibelakangnya membangkang merupakan perlawanan sembunyi-sembunyi.

Perlawanan dari warga Dukuh Sepat bukanlah hal yang dibuat tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya konflik terhadap sengketa lahan alih fungsi Waduk Sepat. Semenjak waduk tersebut ditutup oleh Pemerintah dampaknya sudah sangat dirasakan oleh warga Dukuh Sepat maupun masyarakat

---

<sup>50</sup> Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>51</sup> James C Scott. (1981). *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES. Hal. 69

<sup>52</sup> Tarrow. (1994). *Power In Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*, New York: Cambridge Univesity Press. Hal. 37

luar, hal inilah yang menyebabkan konflik semakin memanas antara pihak masyarakat, Pemerintah, dan Pengembang. Faktor tersebut bisa dilihat pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik.

### 5.3.1. Aspek Ekonomi

Kawasan Waduk Sepat merupakan salah satu tempat mata pencaharian warga sekitar, dimana waduk tersebut menjadi lokasi pemancingan, tempat berjualan atau membuka toko klontongan di sekitar Waduk, dan lain-lainnya.

*“....warga disini memang menggantungkan hidupnya dari waduk sepat jadi kalo waduk ditutup kayak sekarang berarti sama saja pemerintah mematikan perekonomian warga.”<sup>53</sup>*

Dilihat dari pernyataan tersebut, jika alih fungsi Waduk Sepat tetap dijalankan nantinya akan banyak ada perubahan struktur masyarakat dari yang dulunya warga sekitar hanya berjualan dan bertani karena sulitnya lapangan pekerjaan yang ada, dimana tantangan ini menjadi sangat sulit untuk mereka ketika mereka tiap harinya berjualan dan memungkinkan tidak ada lagi warga yang berjualan nantinya. Nyatanya banyak sekali warga yang tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan di sekitar Waduk Sepat tersebut dimana berjualan dan membuka lokasi pemancingan adalah sumber mata pencaharian mereka.

Menurut warga Sepat :

*“..sekarang aja waduknya udah ditutup kami sekeluarga jadi susah dapat uangnya, padahal banyak sekali pengeluaran pastinya. Tau sendiri lapangan pekerjaan susah, kalo emang dijadiin perumahan-perumahan ya rejeki saya hilang. Buat yang masih muda enak masih ada pekerjaan lain tapi buat kita yang udah tua-tua apalagi anak masih belum selesai sekolah ya tidak”<sup>54</sup>*

---

<sup>53</sup> Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>54</sup> Mulyani. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

Berdasarkan kutipan wawancara diatas terlihat jelas bahwa ternyata hidup para warga Dukuh Sepat memang sangat bergantung pada kawasan tersebut. Para warga Dukuh Sepat merasa kehidupan sangat terancam akan adanya sengketa lahan alih fungsi Waduk Sepat tersebut. Adanya pemakaran Waduk Sepat baru-baru ini saja sudah banyak merugikan dan memberikan dampak kepada para warga sekitar, seperti yang sudah terjadi ikan-ikan yang ada di lokasi pemancingan Waduk Sepat banyak yang mati, pasokan air untuk pengairan sawah semakin sulit. Mungkin jika terjadi pembangunan perumahan elite seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah akan terjadi banyak kebangkrutan bagi warga sekitar. Dan tentunya hal ini juga bisa menimbulkan sebuah ancaman baru bagi pemerintah setempat karena dengan hal ini justru meningkatkan angka kemiskinan yang semakin meningkat.

### 5.3.1. Aspek Lingkungan

Efek kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari penutupan Waduk Sepat tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dianggap mengerikan. Berkaca dari latar belakang kota Surabaya adalah kota yang sering dilanda banjir, maka dari itu masyarakat menganggap bahwa adanya waduk tersebut ini bisa menjadi penahan banjir atau menampung air hujan yang turun terlebih bahwa kawasan mereka terdapat di dataran rendah. Adanya alih fungsi ini dianggap menyalahi aturan karena tidak adanya perbincangan tentang tukar guling direncanakan dari pihak pemerintah dan pengembang.

*“..sebenarnya dari tahun 1991 udah ada omongan kalo ada beberapa kawasan yang fungsinya akan diubah itu seperti waduk jeruk yang dijadiin perumahan elit, nah waktu 2008 itu pemerintah*

*ternyata ngadain tukar guling tanpa ada omongan ke pihak masyarakat sama kecamatan sama kelurahan. Maka dari itu kita sebagai warga merasa dirugikan terlebih warga yang bekerja sebagai petani kan guna waduk itu buat mengairi persawahan.”<sup>55</sup>*

Sudah jelas dari pernyataan tersebut hasil dari pemakaran Waduk Sepat tersebut tidak layak dilakukan sengketa lahan alih fungsi Waduk Sepat. Namun pihak pengembang dan pemerintah tetap kembali berdalih bahwa kawasan tersebut tetap dijadikan kawasan perumahan elite. Pemerintah tetap menutup kawasan Waduk Sepat ini karena adanya pengaruh tukar guling yang sudah dilakukan oleh pihak pengembang dan pihak pemerintah sendiri.

Adanya sengketa lahan ini juga menyebabkan dampak lain selain guna untuk mengairi persawahan tetapi juga berdampak menjadi banjir. Maka dari itu harusnya pemerintah kota Surabaya juga harus memperhatikan adanya proyek perubahan alih fungsi tersebut. Menurut Dian Purnomo selaku warga yang bergabung ke dalam aliansi masyarakat :

*“..ditutupnya waduk ini itu sebenarnya bisa nimbulin banjir, ya kita tahu lah Surabaya ini banjir dan Surabaya sendiri waduknya masih sedikit, kalo semua waduk ditutup terus dijadiin perumahan kasian kota kita sendiri, harusnya pemerintah mempertahankan waduk ini malah menutup waduk.”<sup>56</sup>*

Pernyataan diatas sudah jelas bahwa adanya penutupan waduk yang dilakukan oleh pihak pengembang dan pemerintah sendiri mendatangkan dampak-dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Selain banjir warga pun mengakui bahwa dulunya waduk yang sudah diganti kepemilikannya atas nama Citraland ternyata menjadi pembuangan limbah dari perumahan elite kawasan

---

<sup>55</sup> Mulyani. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>56</sup> Dian Purnomo. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

Citriland. Berdasarkan pernyataan warga disekitar sana, para warga dan advokat dari warga perdukuan sepat sendiri sudah pernah melakukan *complain*, namun warga belum bisa menunjukkan bukti tersebut. Selain itu ketika waduk ada hingga saat ini pun masih sering terjadi banjir, maka dari itu warga tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan waduk ketika dilakukan alih fungsi.<sup>57</sup>

### 5.3.2. Aspek Sosial Budaya

Selain dari sisi lingkungan, adanya permasalahan ini sangat berdampak ke aspek sosial budaya terlebih pada ideologi dan nilai sejarah yang terdapat di dalamnya. Waduk Sepat yang telah dianggap sebagai bagian penting dari sejarah kampung yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat sekitar dan waduk ini juga merupakan warisan berharga yang nantinya akan diturunkan pada anak cucu mereka. Menurut masyarakat sekitar, waduk ini juga diartikan sebagai bagian dari keutuhan kampung mereka, jika nanti waduk ini hilang maka kampung mereka pun telah kehilangan salah satu komponen penting dari kehidupan mereka.

Selama bertahun-tahun waduk ini menjadi sarana penting yang gunanya menjembatani hubungan kehidupan kesejahteraan masyarakat sekitar, misal seperti wadah berkumpul, sarana hiburan, tempat bermain anak-anak, memancing, lahan berkebun, dan lain-lainnya.

*“..kalo setiap hari minggu itu ya kami ini sering ke waduk biasanya buat santai-santai buat lepas penat, anak-anak main di lepas sama orang tuanya biasanya main bola karna kan di lahannya itu ada lapangan bola juga, terus orang tuanya ya ngopi-ngopi, mancing gitu..”<sup>58</sup>*

---

<sup>57</sup> Mulyani. Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

<sup>58</sup> Dian Purnomo. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018



Warga sekitar merasa bahwa lahir dan tumbuhnya mereka bersama Waduk Sepat, maka dari itu rasa memiliki terhadap waduk telah merasuk ke dalam bersama setiap individu yang bertempat di Dukuh Sepat sehingga tidak heran jika warga sangat tidak merelakan waduk tersebut jatuh ke pihak pengembang.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa waduk ini bukanlah peninggalan pemerintah jajahan Hindia-Belanda.<sup>59</sup> Waduk Sepat sendiri dibangun murni atas swadaya warga dengan cara menyisakan sebagai lahan milik petani pada masa itu. Pada masa itu, warga sekitar bergotong-royong menggali tanah untuk dijadikan waduk yang pembagian kerjanya telah diatur dengan sedemikian rupa. Dari sejarah waduk ini sendiri, warga merasa bahwa waduk ini adalah aset kampung dan warga memiliki hak atas waduk tersebut.

Warga merasa kecewa tentang keterangan yang diterbitkan pihak Pemkot bahwa waduk dikatakan sebagai bekas waduk, tanah ganjaran (bendo desa) dan tanah pekarangan. Padahal sejak zaman dulu sampai sekarang menjadi masalah sengketa, waduk tetaplah berupa waduk dan selalu berfungsi dengan baik. Waduk tidak pernah digunakan oleh masyarakat sebagai tanah ganjaran yang hasil garapannya nanti dipakai untuk mengkaji perangkat kampung atau desa.

Selain dari segi sosial terkhusus sejarah dari waduk ini, warga Dukuh Sepat sendiri mempertahankan waduk karena kebudayaan yang dimiliki masyarakat Perdukuhan Sepat masih terus mereka lestarikan hingga saat ini. Ada beberapa tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar karena berkaitan dengan sejarah waduk tersebut, meskipun ada beberapa tempat keramat yang tidak lagi

---

<sup>59</sup> Rochim. Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018



digunakan tetapi keberadaannya masih sangat dihormati dan dihargai oleh warga. Salah satunya adalah makam Mbah Cokro dan Mbah Dewi, makam ini terletak di sebelah utara waduk yang lebih rendah kurang lebih 3 m. Makam Mbah Cokro dan Mbah Dewi ini masih ada keberadaannya, tidak jarang warga masih menaruh sesaji ketika mengadakan hajatan atau mengunjungi untuk berziarah dan berdoa. Mitos tentang Mbah Cokro dan Mbah Dewi yang dipercaya merupakan orang pertama yang membangun Dukuh Sepat atau dapat dikatakan sebagai sesepuh. Menurut cerita yang didapatkan dari warga, pada zaman penjajahan dahulu sosok Mbah Cokro dan Mbah Dewi ini memiliki kekuatan sakti maka dari itu sosok mereka sangat dihormati. Warga percaya jika dahulu bahwa penjajah Belanda tidak bisa masuk ke desa karena pandangannya ditutup oleh kesaktian dari Mbah Cokro dan Mbah Dewi. Warga Dukuh Sepat sangat percaya akan kesaktian Mbah Cokro dan Mbah Dewi yang dimakamkan di daerah Sepat tersebut.

Selain ziarah ke Makam Mbah Cokro dan Mbah Dewi, di Dukuh Sepat masih ada ritual *sedekah bumi*, meskipun mayoritas warga tidak lagi bekerja sebagai petani namun warga masih melestarikan budaya itu yang sudah ada secara turun temurun. Salah satu ritual dalam *sedekah bumi* yaitu *tandaan*, para *tandak* (penari) mengelilingi tiga tempat yaitu Balai RW III, telaga yang terketak di Balai RW V dan Sumur Windu yang bertempat di pinggir jalan Raki yang kini dikenal sebagai jalan Wisma Lidah Kulon.

Selain *sedekah bumi*, warga juga sering menggelar *sedekah waduk*. Ritual ini sama seperti ritual *sedekah bumi*, hanya perbedaannya adalah acara ini digelar di sekitar waduk. *Sedekah Waduk* ini dilaksanakan sebagai wujud dari eksistensi

budaya Perdukuhan Sepat yang ditunjukkan warga Dukuh Sepat kepada khalayak luar.

*“sedekah bumi itu dilakuin di waduk sepat sendiri, bedanya nanti para penari itu ngiterin waduknya, nanti kita bawa makanan atau barang biasanya misal dari RW III bawa tumpengan terus RW V bawa yang lain begitu..”<sup>60</sup>*

Warga Dukuh Sepat mempertahankan waduk demi keutuhan kampung mereka dan juga sebagai bentuk penghormatan mereka kepada sang leluhur yang sudah susah payah membangun waduk di masa lampau hingga berguna bagi masyarakat Dukuh Sepat sekarang. Dari pernyataan diatas, warga sangat berjuang untuk mempertahankan waduk tersebut, pengembalian fungsi waduk kepada masyarakat setempat merupakan harga mati yang masyarakat inginkan hingga sampai kapanpun warga menyatakan bahwa mereka tidak akan rela melepas waduk kepada pihak pengembang.

Terdapat satu pepatah bahasa Jawa yang dapat menggambarkan kondisi warga Dukuh Sepat Lidah Kulon yaitu *“Sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi tekan pati* (meski luasnya selebar dahi, tanah akan dipertahankan sampai mati)” yang mempunyai arti apapun resiko yang akan diterima, tanah yang mereka miliki tetap akan dibela sampai titik darah penghabisan. Jika hak atas tanah terlepas dari seseorang, maka individu atau kelompok akan merasa *“pedhot jangkare soko bumi”* (lepas ikatannya dari tanah pustaka atau tanah kelahirannya). Dapat dikatakan bahwa permasalahan tanah pada hakekatnya bukan hanya mengenai hubungan antara manusia dengan tanah namun melainkan tentang hubungan manusia dengan manusia. Hal ini tidak dapat lepas

---

<sup>60</sup> Dian Purnomo. Wawancara. Sekretariat LPBP. 29 Mei 2018

dari keinginan yang melekat pada individu atau kelompok yang merasuk dalam kelompok sosial tentang suatu objek. Dengan demikian bahwa setiap individu yang bertempat tinggal di sekitar Waduk Sepat terpengaruh oleh nilai-nilai sakral yang terkandung dalam tanah sehingga membuat beberapa kelompok atau individu dalam masyarakat mempunyai jiwa mempertahankan apa yang mereka miliki.

#### 5.4. Framing Isu Laskar Pembela Bumi Pertiwi

Secara teoritis proses *framing* atau pembedakan merupakan rangkaian dari proses penanaman ide dan pembedakan isu yang kemudian menentukan aliansi sepanjang sebuah gerakan yang berlangsung. *Framing* adalah sebuah alat yang nantinya bisa mengarahkan individu-individu sesuai dengan bagaimana isu tersebut dibingkai atau dibentuk. *Framing* juga merupakan sebuah cara yang gunanya untuk meyakinkan individu ataupun membentuk kelompok yang luas sehingga terdorong dalam sebuah perubahan.

*Framing* bertujuan untuk membentuk isu yang telah ditunjukkan oleh aktor yang melakukan *framing*. Dalam *framing*, aktor gerakan harus mampu menjelaskan mengapa isu yang diangkat itu penting atau tidak. Setelah itu, aktor gerakan harus meyakini kelompok sasaran bahwa isu yang diangkat merupakan permasalahan bersama. Dan tahapan terakhir adalah aktor gerakan harus mampu menggunakan tindakan yang mengatur dan membentuk identitas, klaim, dan strategi yang akan digunakan oleh suatu perlawanan.

Untuk melakukan *framing* terdapat empat aspek yang harus dipenuhi.

**Pertama** adalah mendefinisikan persoalan yang bertujuan untuk mempermudah

gerakan dalam melakukan pemetaan masalah yang akan menentukan strategi. **Kedua** adalah mendefinisikan identitas gerakan yang bertujuan untuk mengetahui suatu gerakan yang merepresentasi dari suatu masyarakat atau kelompok yang seperti apa, selain itu juga berisi alasan mengapa suatu gerakan ingin menjadi representasi dari masyarakat atau kelompok. **Ketiga** adalah mengidentifikasi lawan yang bertujuan untuk mengetahui siapa kelompok lawan didalam isu yang sedang dihadapi. Ketika suatu gerakan telah mampu mengidentifikasi lawan maka gerakan bisa menentukan siapa saja pihak yang menjadi sumber permasalahan. **Keempat** adalah mengidentifikasi strategi dan metode gerakan yang akan dilakukan, hal ini bertujuan untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh gerakan agar dapat membentuk suatu perubahan.

Dalam gerakan Laskar Pembela Bumi Pertiwi *framing* yang dibangun merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh gerakan tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap sengketa lahan Waduk Sepat yang dianggap tidak sesuai dengan aspek-aspek kehidupan yang dianut oleh warga Dukuh Sepat. *Framing* yang dibentuk oleh gerakan ini salah satunya dengan bagaimana cara membentuk dan menyebarkan isu tentang kasus sengketa lahan Waduk Sepat tersebut. Sehingga dengan cara-cara tersebut nantinya akan memicu sebuah gerakan yang dilakukan oleh sebuah kelompok maupun individu. Cara ini juga memiliki peran penting dalam gerakan ini karena nantinya akan membuat masyarakat Dukuh Sepat memiliki kerangka berfikir dan kesadaran yang sama mengenai kasus sengketa lahan. Dian Purnomo menyatakan bahwa:

*“kalo kelompok masyarakat disini sebenarnya sudah ada dari dulu, Cuma semenjak ada masalah ini jadi kami semakin menyatu*

*dan akhirnya membentuk LPBP ini dan tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak yang kami miliki terlebih masalah lahan yang ada.”<sup>61</sup>*

Dari pernyataan tersebut menyatakan, anggota dari LPBP ini sebagian besar berasal dari masyarakat asli Dukuh Sepat. Masyarakat Dukuh Sepat mempunyai sifat yang masih menghargai dan melestarikan budayanya sendiri. Berangkat dari isu yang diangkat dari Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP) untuk membantu dan memperjuangkan aspirasi masyarakat didalamnya kepada Pemerintah yang mempunyai tujuan akhir yang dicapai adalah kesejahteraan sosial masyarakat.

*Framing* isu yang didatangkan oleh gerakan ini sendiri adalah isu lingkungan yang sangat kuat hubungan dengan kehidupan sosial budaya di Dukuh Sepat. Selain isu lingkungan, isu sosial budaya juga merupakan salah satu isu yang diangkat oleh Laskar Pembela Bumi Pertiwi. Isu lingkungan dan kebudayaan di Dukuh Sepat memang sangat melekat di dalam diri masyarakat Dukuh Sepat. Karena bagi masyarakat Dukuh Sepat, kawasan Waduk Sepat ini merupakan salah satu upaya penghubung antar interaksi masyarakat dengan masyarakat maupun kehidupan alam dengan manusia.

Dari permasalahan ini, Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP) membagi aktor yang diduga memiliki andil besar dalam permasalahan ini menjadi dua bagian. Pertama adalah aktor formal yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Kedua adalah aktor ekonomi yaitu pihak pengembang PT. Ciputra Surya. Tetapi dalam masalah ini, LPBP lebih banyak melakukan perlawanan kepada Pemkot karena masyarakat lebih menganggap bahwa permasalahan ini bermula karena Surat

---

<sup>61</sup> Dian Purnomo. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018



Keputusan yang mengakibatkan adanya pemindahan status kepemilikannya menjadi milik Pemkot dan melakukan tukar guling. Dian Purnomo menyatakan bahwa:

*“kami disini menganggap bahwa lawan kami adalah pemkot dan PT. Ciputra, disini kami memang lebih banyak melakukan perlawanan ke pemkot karena pusat dari permasalahan ini adalah pemkot. Berawal dari SK Wali Kota yang keluar waktu itu disitu kami merasa kecewa dan melakukan perlawanan untuk melakukan pencabutan SK tersebut.”<sup>62</sup>*

Jika menitik lebih dalam mengenai isu yang dihadirkan oleh perlawanan ini, gerakan ini menitik beratkan pada upaya antipati masyarakat Dukuh Sepat tentang adanya perubahan alih fungsi dari Waduk Sepat sendiri serta perebutan sengketa lahan yang nantinya perubahan lahan ini menjadi pusat penanaman modal yang dilakukan oleh para pihak pengembang. Masyarakat Dukuh Sepat merasa cemas dengan hilangnya kebudayaan yang sudah ditanam sejak zaman dahulu akibat kasus sengketa lahan Waduk Sepat. Maka ketika adanya sebuah proyek sengketa lahan muncul, hal ini merupakan sebuah momentum dari masyarakat melakukan perlawanan dengan cara menolak kebijakan yang dibuat oleh pihak Pemkot dan pengembang serta membuat gerakan perlawanan karena masyarakat merasa kebijakan ini sudah banyak merugikan masyarakat banyak sebelumnya.

Tahapan terakhir *framing* adalah identifikasi streategi atau identifikasi gerakan untuk melakukan perubahan. Sebelum melakukan tindakan, hal ini terlebih dahulu yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah menetapkan simbol dari permasalahan yang ada. Seperti yang telah dijelaskan, awalnya masyarakat hanya membentuk kelompok-kelompok masyarakat biasa untuk saling

---

<sup>62</sup> Dian Purnomo. Wawancara. Sekretariat LPBP. 29 Mei 2018



bersilahturahmi tetapi dengan permasalahan tentang adanya sengketa lahan yang menyebabkan pembangunan perumahan elite di lahan waduk akhirnya mereka membentuk gerakan dari masyarakat Dukuh Sepat yaitu Laskar Pembela Bumi Pertiwi.

Gerakan perlawanan ini lalu muncul dengan pemingkanaan isu sebagai organisasi sosial masyarakat yaitu Laskar Pembela Bumi Pertiwi. Gerakan ini terbentuk karena adanya konflik waduk bergulir serta menjadi wadah bagi masyarakat perdukahan Sepat untuk terus mempertahankan waduk. Dengan adanya isu lingkungan serta isu budaya yang diusung, gerakan ini merasa lebih dapat menyuarakan suara perlawanan mereka. Isu mengenai lingkungan serta kebudayaan ini memang sebuah isu yang diangkat dan dianggap sebagai isu yang sangat pas untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat Dukuh Sepat untuk melakukan perlawanan terhadap sengketa lahan Waduk Sepat.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, gerakan perlawanan ini melakukan beberapa upaya untuk memperjuangkan lahan waduk tersebut. Banyak aksi gerakan yang dilakukan LPBP serta masyarakat seperti melakukan audiensi, *hearing*, unjuk rasa, dan aksi damai. Aksi damai dilakukan karena tetap mereka ingin mempertahankan dengan menggunakan unsur kesopanan dan tidak anarkis. Aksi damai ini memang berjalan tetapi menurut Koordinator Aksi yakni Dian Purnomo, dalam gerakan ini tetap saja tidak mendapat respon apapun dari pihak pemerintah.

*“kami sudah jalanin aksi dari demo, hearing, forum, diskusi sampai aksi damai waktu itu tetap saja tidak ada respon dari Pemkot. Dari*

*aksi yang kami lakukan malah dilempar ke Satpol PP, menurut kami tidak ada hubungannya masalah ini dengan Satpol PP”<sup>63</sup>*

### 5.5. Strategi dan Aksi Gerakan

Sesuai dengan pengklasifikasian perbedaan antara gerakan sosial lama dan baru yang dapat dilihat dari aksi yang dilakukan. Gerakan sosial baru identik dengan bentuk aksi yang tidak biasa, perencanaan yang sudah matang dan lengkap serta dengan simbol yang merepresentasikan gerakan mereka. Aksi dari gerakan Laskar Pembela Bumi Pertiwi dan beberapa masyarakat sekitar direalisasikan dengan berbagai bentuk seperti forum warga, *hearing* DPRD Surabaya, unjuk rasa, aksi damai, hingga aksi lingkungan penanaman pohon. Menurut Dian Purnomo selaku sekretaris LPBP, semua jalan sudah ditempuh oleh masyarakat dalam melakukan aksi penolakannya,

*“..mulai dari hearing, demo, pernyataan sikap semuanya sudah kami lakukan, bahkan sekarang sudah menempuh jalur hukum..”<sup>64</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut sudah jelas bahwa masyarakat sudah melakukan segala cara dalam aksi mereka. Dari aksi yang biasa sampai jalur hukum tetap terus mereka tempuh yang menjadi bentuk perlawanan dari masyarakat Dukuh Sepat.

#### 5.5.1. Forum Warga

Perlawanan warga Dukuh Sepat sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004 jauh sebelum warga menerima Surat Keterangan (SK) Wali Kota Surabaya tahun 2008 yang mengatakan bahwa status kepemilikan Waduk Sepat sudah berpindah status kepemilikannya menjadi milik Citraland atau PT. Ciputra Surya, Tbk.

---

<sup>63</sup> Dian Purnomo. Wawancara. Sekretariat LPBP. 29 Mei 2018

<sup>64</sup> Dian Purnomo. Wawancara. Sekretariat LPBP. 29 Mei 2018

Dalam setiap forum yang dihadiri pihak Kelurahan dan Kecamatan yang telah berulang kali dilakukan dan membahas tentang aset-aset kampung yang kemungkinan jatuh ke tangan Pemkot Surabaya atau pun pengembang, dari hal inilah warga sudah menunjukkan sikap bahwa mereka tidak mau melepas waduk kepada siapa pun. Pemagaran waduk pertama kali dilakukan pada tahun 2010, namun pada waktu itu warga belum berani mengambil sikap tegas karena takut sehingga membiarkan pihak pengembang memagari waduk dan permasalahan ini pun tenggelam sampai bulan April 2011.

#### **5.5.2. *Hearing* DPRD Surabaya**

Protes warga mengenai pembagian dana 3 miliar tidak mendapat tanggapan dari pihak Kelurahan, Kecamatan, hingga kepolisian. Sehingga, warga mengadu ke DPRD Surabaya. Aksi ini menarik perhatian bagi Komisi B DPRD Surabaya yang akan berjanji mengadakan *hearing* bersama warga Dukuh Sepat untuk membantu menyelesaikan kisruh yang terjadi. Pada tanggal 19 April 2011, untuk pertama kalinya Komisi B DPRD Surabaya mengadakan *hearing* antara warga yang diwakili oleh RT, RW, dan LKMK serta perwakilan dari pihak Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri beserta PT. Ciputra Surya dan Polsek Lakarsantri. Guna dari *hearing* tersebut diadakan untuk menjelaskan akar dari persoalan yang sebenarnya terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sayangnya dalam *hearing* tersebut pihak dari pengembang tidak dapat menghadiri acara tersebut karena ada pertemuan lainnya, sebagaimana yang sudah tertera pada surat yang diberikan kepada pihak pengembang kepada Komisi B. Sedangkan Camat Lakarsantri yang menjabat pada saat itu yaitu Minun Latif dan

Lurah Lidah Kulon Ahmad Supriyadi juga tidak hadir tanpa alasan. Hal ini membuat pihak DPRD Komisi B kecewa. Karena pihak pengembang dengan Kelurahan serta Kecamatan tidak hadir pada saat itu maka rapat pun diundur dan persoalan tidak jadi terselesaikan pada saat itu juga.<sup>65</sup>

Pada tanggal 26 April 2011, DPRD Surabaya kembali mengadakan *hearing* untuk menuntaskan masalah pembagian dana 3 miliar yang diberikan oleh pihak pengembang yaitu Citraland. Kali ini yang mengadakan *hearing* ini adalah Komisi A. Komisi A lebih melihat pada sisi fakta atau bukti dari kepemilikan yang dimiliki oleh pengembang. Dari pertemuan ini ada hal yang diketahui bahwa ternyata dana sebesar 3 miliar bukan dana CSR yang selama ini diperkirakan oleh warga. Dana tersebut merupakan dana kompensasi dari pengembang kepada warga atas tukar guling waduk antara Pemkot Surabaya dengan PT. Ciputra Surya. Langkah yang dilakukan oleh pihak pengembang telah sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pansus Tukar Guling DPRD Surabaya tahun 2008. Perwakilan dari pengembang yaitu Nurul Haqi mengatakan bahwa proses tukar guling ini tidak mencapai 20 hektar yang disepakati tetapi hanya 14 hektar saja termasuk Waduk Sepat di dalamnya.<sup>66</sup>

Dilihat dari persoalan pembebasan lahan di Waduk Sepat sebenarnya sudah beres bila dilihat dari sisi sertifikasi tanah dan dana kompensasi 3 miliar yang dibagikan kepada warga. Namun di sisi lain warga tidak terima karena merasa

---

<sup>65</sup>Harian Merdeka Post. *Ajukan Gugatan Pra Peradilan, Warga Waduk Sepat Temukan Kejanggalaan Penghentian Penyidikan Perkara Waduk Sepat Oleh Polda Jatim*. diakses dalam <http://www.harianmerdekapost.com/2018/02/> pada 29 Mei 2018 pukul 18.20 WIB

<sup>66</sup> Harian Merdeka Post. *Ajukan Gugatan Pra Peradilan, Warga Waduk Sepat Temukan Kejanggalaan Penghentian Penyidikan Perkara Waduk Sepat Oleh Polda Jatim*. diakses dalam <http://www.harianmerdekapost.com/2018/02/> pada 29 Mei 2018 pukul 18.20 WIB

dibohongi oleh pihak panitia, warga bersikukuh untuk tidak akan melepas waduk tersebut dan menuntut pihak-pihak yang bersangkutan untuk bertanggung jawab.

Pada bulan Januari 2012, kegiatan *hearing* kembali dilaksanakan oleh pihak Komisi B DPRD Surabaya. Dalam *hearing* ini dihadiri oleh anggota pansus tukar guling waduk yang memberikan pernyataan bahwa pansus pernah mengadakan sidak sebelum menukar aset dengan pihak pengembang. Tetapi ketika ditanya kapan dan dimana tempatnya, pihak pansus tidak bisa menjawab. Dari proses *hearing* memang menyatakan tidak ada hasil dari aksi ini maka dari itu masyarakat tetap melakukan perlawanan dari bentuk lain selain *hearing*.

### **5.5.3. Gerakan Jalanan**

Dengan adanya konflik yang semakin rumit dan tidak ada kejelasan pihak pemerintah dari aksi LPBP demi mencapainya tujuan mereka. Aksi gerakan jalanan merupakan aksi yang dilakukan oleh Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP), dalam aksi gerakan jalanan terdapat aksi unjuk rasa, pemasangan baliho di sekitar waduk. Aksi ini bertujuan menuntut agar pihak pengembang dan pemerintah juga sadar dan turut memperhatikan nasib masyarakatnya dan juga kebudayaan suatu daerah.

Aksi unjuk rasa sering sekali dilakukan di berbagai tempat. Dalam aksi unjuk rasa ini, waduk menuntut pengembalian fungsi waduk dan penjelasan mengenai dana kompensasi 3 miliar yang dibagikan oleh pengembang Citraland. Unjuk rasa biasanya direncanakan sehari atau dua hari setelah pembagian dana dengan melakukan koordinasi antar warga. Pada kajian aksi ini warga menginginkan agar Lurah mencabut surat penunjukan panitia yang membagikan



dana dan melaporkan mengenai masalah ruislag waduk itu kepada Wali Kota Surabaya.

**Gambar 5.1. Aksi Unjuk Rasa LPBP**



Aksi Unjuk Rasa LPBP dan beberapa LSM

Sumber : Dokumentasi Penulis

Aksi gerakan unjuk rasa ini biasanya dilakukan di depan Kantor Pemkot Surabaya, serta adanya pemasangan baliho-baliho di sekitar kawasan Waduk Sepat. Di dalam baliho ini menuliskan beberapa pernyataan masyarakat bahwa warga Dukuh Sepat menolak adanya *ruislag* Waduk Sepat dan perubahan alih fungsi Waduk tersebut. Maksud dari baliho pun menjadi pertanyaan apa maksud dari “Selamatkan Waduk Sepat” dan “Batalkan Ruislag Waduk Sepat” yang dituliskan dalam baliho tersebut. Dian Purnomo menyatakan bahwa yang dimaksud dalam baliho tersebut adalah:

*“..ruislag itu kan artinya tukar guling, jadi orang-orang menganggap bahwa perbincangan tentang tukar guling tidak melibatkan warga sekitar jadi warga menginginkan pihak pemerintah serta pengembang membatalkan ruislag tersebut. Kata-kata di baliho ini sebenarnya biar pemkot tau kalau warga disini tidak main-main dengan aksi kami..”*



Sesuai dengan pernyataan diatas, pihak pengembang akan mengubah alih fungsi dari Waduk Sepat yang dahulunya berguna bagi masyarakat sekitar dan sekarang ingin diubah fungsinya. Aksi unjuk rasa ini sering sekali dilakukan oleh LPBP dan masyarakat, aksi yang mereka lakukan sebenarnya jarang sekali mendapat *feedback* dari pihak Pemerintah Kota. Setiap mereka aksi tanggapan dari Pemkot selalu meminta warga untuk menunggu tanpa ada kejelasan yang pasti.

*“..ya gitu tiap kita aksi pasti pemerintah itu selalu bilang iya iya aja terus kadang dilempar ke satpol PP padahal tujuan kami kan ke pemkot..”<sup>67</sup>*

Selain itu, aksi unjuk rasa ini menyatakan bahwa keberadaan Waduk Sepat memiliki nilai sejarah bagi warga sekitar sehingga pihak masyarakat meminta pemerintah menghentikan tukar guling (*ruislag*) dan mengembalikan lahan waduk seutuhnya pada warga. Dian Purnomo menyatakan bahwa:

*“kami warga Sepat Lidah Kulon tetap menginginkan adanya Waduk Sepat kembali secara utuh seluas 6,7 hektar”<sup>68</sup>*

Dari penjelasan tersebut maka jelas, aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mempertahankan waduk bukan sikap ganti rugi pemerintah kepada masyarakat dan dari aksi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat lebih sadar akan kehidupan dan kebudayaan mereka nantinya. LPBP dan masyarakat sekitar tidak akan menyerah begitu saja sampai mereka bisa membuka para pemangku kebijakan untuk segera menyadari bahwa perlawanan yang mereka lakukan tidak akan berhenti sampai waduk itu menjadi milik masyarakat kembali.

---

<sup>67</sup> Dian Purnomo. Wawancara. Sekretariat LPBP. 29 Mei 2018

<sup>68</sup> Dian Purnomo, Orasi Unjuk Rasa “Selamatkan Waduk Sepat. Kantor Pemerintah Kota Surabaya 30 Mei 2018

#### 5.5.4. Aksi Damai

Pada tanggal 28 Juli 2011 warga mencoba cara lain yakni menggelar aksi damai yang masih terkait dengan *ruislag* Waduk Sepat dengan menyebarkan selebaran di dekat *traffic light* pintu masuk sebelah timur kawasan perumahan Citraland. Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP) membagikan selebaran yang berisi awal mula permasalahan di Waduk Sepat Lidah Kulon kepada para pengguna jalan yang lewat. Aksi ini dilakukan agar masyarakat luas juga bisa mengerti dan mengetahui permasalahan yang sedang terjadi seputar Waduk Sepat. Dari aksi inilah LPBP sendiri dapat menggalang dukungan dari masyarakat lain untuk melancarkan aksi mereka dalam mempertahankan waduk. Aksi ini mendapatkan pengawasan dan penjagaan ketat dari kepolisian yang berakhir dengan damai tanpa adanya kericuhan apa pun.<sup>69</sup>

#### 5.5.5. Aksi Lingkungan

Pada tanggal 22 Januari 2011 warga mengadakan aksi penanaman pohon untuk mempertahankan waduk dari ekspansi pengembang yang mendapat dukungan dari Solidaritas Darurat Nasional (SDN) Jawa Timur. Aliansi yang tergabung dalam aksi ini ada berbagai organisasi seperti: WALHI Jatim, LAMRI, KontraS, PPRM, Lembaga Bhinneka, PPI, SMI, PRD, SBK-KSN, PAS, JRKI, FMN, Forum Kalimas, SAKERA, PRRT, GMNI Surabaya, IKOHI Jatim, Perempuan Mahardika, PUSHAM, SEBUMI dan organisasi masyarakat Dukuh Sepat yakni Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP).

---

<sup>69</sup> Harian Merdeka Post. *Ajukan Gugatan Pra Peradilan, Warga Waduk Sepat Temukan Kejanggalan Penghentian Penyidikan Perkara Waduk Sepat Oleh Polda Jatim*. diakses dalam <http://www.harianmerdeka.com/2018/02/> pada 29 Mei 2018 pukul 20.02 WIB

Aksi ini merupakan bentuk dari solidaritas teman-teman seperjuangan yang bersama menyerukan agar lahan-lahan yang sedang bersengketa, baik antara warga dengan pihak pemerintah segera dikuasai oleh warga kembali. Aksi ini diisi dengan kegiatan penanaman pohon dan tumpengan di sela-sela panen cabai (*lombok*) di sekitar area waduk. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan sisi tanggul untuk membuktikan bahwa tanah dipinggiran waduk ini masih produktif dan menjadi simbol perlawanan warga terhadap pihak Pemerintah Kota dan pihak pengembang. Warga membuat sebuah plakat yang berisikan bahwa waduk merupakan milik warga Dukuh Sepat sebagai bentuk identitas kepemilikan mereka. Tanaman yang ditanam oleh warga antara lain adalah sawo, trembesi, lendep, nangka, dan lain-lainnya. Setelah aksi penanaman pohon usai, aksi ini diakhiri dengan tumpengan sebagai wujud rasa syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>70</sup>

#### 5.5.6. Gerakan Intelektual

Aksi yang dilakukan oleh LPBP dalam gerakan intelektual diantaranya adanya audiensi, adanya gerakan serangan yang dilakukan melalui sosial media, pembuatan isu melalui tulisan-tulisan yang bertema selamatkan Waduk Sepat untuk memperkuat wacana-wacana mengenai sengketa lahan, dan aksi hukum terkait dugaan pemalsuan sertifikat Waduk Sepat. Dalam pertemuan tatap muka disebut audiensi, dengan adanya audiensi ini masyarakat menyampaikan keluhan kesah penolakan terhadap sengketa lahan tersebut. Tetapi nyatanya pemerintah

---

<sup>70</sup> Berdikari Online. *Tolak Tukar Guling Waduk Sepat, Rakyat Gelar Aksi Tanam*. Diakses pada <http://www.berdikarionline.com/tolak-tukar-guling-waduk-sepat-rakyat-gelar-aksi-tanam-pohon/> pada 31 Mei 2018 pukul 22.19 WIB

punya pembelaan yang mengatakan bahwa itu adalah perubahan tata ruang wilayah dan ekonomi.

Selain diadakannya diskusi melalui forum warga yang diadakan oleh LPBP untuk membahas dari adanya sengketa lahan tersebut. Diskusi ini biasanya dilakukan dengan beberapa LSM, mahasiswa, dan masyarakat untuk membahas mengenai perkembangan kasus ini dan membahas mengenai langkah-langkah selanjutnya yang ingin mereka tempuh nantinya untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut.

Aksi lainnya berbentuk serangan melalui media sosial. Laskar Pembela Bumi Pertiwi beberapa LSM yang ikut mengadvokasi melakukan aksi tersebut melalui beberapa media diantaranya *instagram*, *twitter*, dan juga *website*. Hal ini dilakukan oleh LSM yang ikut membantu karena dari pihak LPBP sendiri tidak memiliki media sosial yang mengatasnamakan LPBP. Dalam media sosial yang mereka miliki, mereka menerbitkan beberapa artikel mengenai penolakan terhadap sengketa lahan tersebut dan juga mempublikasikan aksi-aksi yang akan mereka lakukan. Selain itu juga terdapat ajakan atau undangan terbuka bagi siapa pun yang ingin mengikuti aksi dari gerakan ini. Dengan segala perkembangan zaman, cara ini adalah cara yang paling ampuh untuk menyadarkan masyarakat luas terkait dengan gerakan ini. Bahkan dengan cara ini isu-isu yang mereka kembangkan akan menjadi berkembang pesat ke seluruh pelosok.

Tidak hanya berhenti melalui pengembangan isu melalui media sosial. LPBP mempunyai cara lain yang akan mereka lakukan melalui selain serangan media sosial. Cara yang mereka tempuh adalah melalui petisi online, dimana

menganjurkan para pendukung gerakan ini dimana pun mereka berada untuk mengisi dan menanda tangani petisi tersebut. Hal ini dirasa cukup akurat karena para pendukung penolakan terhadap sengketa lahan ini bisa menyumbangkan dan juga ikut berpartisipasi dalam gerakan ini tanpa harus jauh-jauh mengikuti aksi ke Surabaya.

Selain aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh gerakan LPBP ini dan tidak adanya tanggapan dari pihak pemerintah, maka pihak LPBP pun maju ke dalam aksi hukum dimana LPBP bersama tim advokasi (LBH) melaporkan ke Pengadilan Negeri Surabaya terkait dugaan pemalsuan sertifikat Waduk Sepat. Hal ini dilakukan oleh warga untuk mengajukan pra peradilan kepada POLDA Jatim. Gugatan ini diajukan warga karena pihak kepolisian yang telah melakukan penghentian penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat otentik yakni memalsukan keterangan data fisik Waduk Sepat dalam sertifikat No. 4057/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan luas 59.857 m<sup>2</sup> atas nama PT. Ciputra Surya Tbk yang didalamnya menyebutkan bahwa Waduk Sepat adalah tanah “pekarangan” padahal kenyataannya dilapangan bahwa Waduk Sepat dari dulu hingga sekarang masih berupa waduk. Maka dari itu LPBP mempertahankan ruang sosial ekologi kota dan masyarakat Dukuh Sepat ingin Waduk Sepat kembali seperti semula bukan dikeruk dan diurug demi pembangunan yang nyatanya jauh dari tujuan kesejahteraan. Aksi hukum ini masih terus menerus berjalan karena permasalahan ini hingga sekarang belum terselesaikan dan belum ada pencabutan penutupan waduk.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa aspek-aspek yang mendorong masyarakat Dukuh Sepat melakukan perlawanan terhadap sengketa lahan Waduk Sepat adalah aspek-aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan dan juga aspek politik. Dimana aspek yang paling dititik beratkan adalah aspek sosial budaya serta aspek lingkungan. Dalam aspek sosial budaya di kehidupan masyarakat Dukuh Sepat sangat kental sekali hubungan persaudaraan yang dijalin serta ritual-ritual yang diadakan oleh masyarakat Dukuh Sepat sendiri karena dengan ritual budaya yang diadakan adalah salah satu hal untuk menghormati sesepuh mereka terdahulu, serta kebiasaan yang masyarakat lakukan dahulu secara perlahan hilang begitu juga nama kampung sepat yang tiada karena nama ikon dari Dukuh Sepat ini adalah Waduk Sepat. Selain aspek sosial budaya, aspek lingkungan juga termasuk aspek yang dilihat mengapa masyarakat melakukan penolakan. Dalam aspek lingkungan, waduk yang dulunya berfungsi untuk menahan banjir jika waduk ini hilang maka fungsi dari waduk ini pun juga hilang, mengingat bahwa kota Surabaya ini dikenal dengan adanya banjir. Dengan anggapan lain dari adanya sengketa lahan yang menimbulkan perubahan alih fungsi dilaksanakan akan sangat membawa dampak buruk bagi lingkungan. Strategi gerakan Laskar Pembela Bumi Pertiwi ini muncul dari berawalanya masalah sengketa lahan



Waduk Sepat yang menyebabkan permasalahan isu lingkungan dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Dari pembentukan gerakan LPBP ini terdapat *framing* isu yang merupakan pembedaan serta rangkaian proses penanaman ide dan yang menentukan aliansi sepanjang sebuah gerakan akan berlangsung. Dari pembentukan ide dari gerakan LPBP untuk menitik beratkan dengan adanya perubahan alih fungsi dari Waduk Sepat tersebut. Ketika adanya sebuah permasalahan tentang sengketa lahan, hal ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan dengan cara menolak kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota.

Dalam melakukan gerakan, gerakan LPBP merupakan sebuah kombinasi dari mobilisasi sumber daya dengan pengembangan aspek identitas menurut teori gerakan sosial baru. Dalam permasalahan ini, strategi yang dilakukan menggunakan pemikitan mobilisasi sumber daya yang jelas. Berawal dari pengembangan isu serta mengembangkan sumber daya yang ada.

Dalam strategi yang dilakukan oleh gerakan Laskar Pembela Bumi Pertiwi tersebut dengan melakukan beberapa aksi yang dibagi menjadi beberapa gerakan seperti forum warga, *hearing* DPRD Surabaya, unjuk rasa, aksi damai, lalu penanaman pohon. Serta gerakan intelektual yang dilakukan dengan adanya audiensi, adanya gerakan serangan yang dilakukan melalui sosial media, pembuatan isu melalui tulisan-tulisan yang bertema selamatkan Waduk Sepat untuk memperkuat wacana-wacana mengenai sengketa lahan, dan aksi hukum terkait dugaan pemalsuan sertifikat Waduk Sepat serta seruan-seruan aksi yang masih dilakukan hingga saat ini.

## 6.2. Saran

Berdasarkan temuan dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian di lapangan, maka peneliti memberikan saran atas permasalahan gerakan LPBP dalam penolakan terhadap sengketa lahan, sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam adanya sengketa lahan tetap harus memperhatikan kehidupan masyarakat Dukuh Sepat dengan cara mencabut Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota tanpa menggantung permasalahan ini begitu saja.
2. Adanya pemberian tanggapan terhadap seruan aksi yang dilakukan oleh LPBP serta masyarakat yang mengikuti seruan-seruan aksi. Tanggapan yang diberikan oleh pemerintah akan membuat kejelasan terhadap permasalahan ini dan nantinya akan menjadi titik terang dalam kasus ini.
3. Rekomendasi selanjutnya, adanya inovasi baru terkait tentang aksi tersebut dalam upaya pemerintah mencabut penutupan waduk. Seiring dengan berjalan 8 tahun gerakan ini, nampaknya pemerintah sudah kebal atas aksi yang mereka lakukan. Mungkin nantinya akan ada sebuah gebrakan baru dari gerakan ini yang membuat pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga masyarakat luas semakin sadar bahwa gerakan ini masih ada dan bertahan terus untuk melawan adanya proyek tersebut seperti, gerakan yang terorganisir (perluasan jaringan, dukungan modal atau alat, personalia, struktur, mekanisme kerja, dan lain-lain) akan
4. Menjaga kelestarian kebudayaan Dukuh Sepat. Sehingga nantinya budaya yang sudah dilakukan akan terus berjalan dan menjadi

ketertarikan sendiri bagi masyarakat lain sehingga tidak lupa akan budaya yang ada.

5. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak atau memperluas cakupan yang akan dijadikan fokus penelitian jika nantinya akan memilih objek tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rajendra Singh (2010), *Gerakan Sosial Baru*, Terj., Yogyakarta: Resist Book
- Abdul Wahib Situmorang.(2013). *Gerakan Sosial : Teori dan Praktik* .,Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Manulu, Dimpos. (2009). *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Bert Klandermans,(2005). *Protes : Dalam Kajian Psikologi Sosial* .,Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soenyono.(2005). *Teori-teori Gerakan Sosial*. Surabaya : Yayasan Kampusiana
- Rajendra Singh,(2005). *Gerakan Sosial Baru*.Yogyakarta : Resist Book
- Zaiyardam, Zubir. (2002). *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press
- James C.Scott.(1981). *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES
- Tarrow.(1994), *Power In Movement, Social Movement, Collective Action and Politics*, New York: Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2015).*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RND*, Bandung: PT Alfabeta
- Sarwono Jonathan (2013),*Strategi Melakukan Riset (Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan)*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nawawi Hadari (1995), *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM Press
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfa Beta
- Samoji Sarosa (2012), *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT. Indeks
- Sugiyono (2012), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

## JURNAL

- Adhi Murti Citra Amalia H, (2012), "*Jurnal: Konflik Waduk Sepat*", Surabaya: Universitas Airlangga
- Ruri Widyani (2012). "*Jurnal : Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Penguasaan Lahan Oleh Pengembang Di Wilayah Surabaya Barat(Studi Tentang Sengketa Kasus Waduk Sepat Lidah Kulon)*", Surabaya: Universitas Airlangga, Vol. 1
- Fuat Hasan (2016), "*Skripsi: Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani, Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta,*" Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Affan Mukti (2010), "*Jurnal : Pembahasan Undang-Undang Agraris Nomor5 Tahun 1960*", Medan ; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 3 No. 4
- Irawati (2012), "*Jurnal: Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kurai Dala, Reprerentasi Politik Lokal*", Padang: Universitas Andalas, Vol. 3 No.1
- Hasanuddin (2007), "*Jurnal: Dinamika dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial,* Riau: Universitas Riau
- Muntobingul. (2012). *Gerakan LSM KOLING Pada Upaya Konservasi Hutan Dieng Tahun 2000-2010*. Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 8
- Rangga Pati Liandra (2014), "*Jurnal: Managemen Konflik Agraria Studi Kasus Desa Tangan Kec. Bangun Purba Rokan Hulu Tahun 2012-2013*", Riau: Fisip Universitas Riau

## INTERNET

- <http://surabaya.detik.com/read/2011/07/28/144433/1691503/466/aksi-tolak-ruislag-sepat-lidah-kulon-terus-bergelora>
- <http://surabayadetik.com/read/2012/01/22/124954/1822141/466/pertahankan-waduk-sepat-warga-tanam-pohon-dan-tumpengan>

## WAWANCARA

Rochim. Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat. Route 13 Lidah Kulon Surabaya.  
28 April 2018

Rochim. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

Dian Purnomo. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

Mulyani. Wawancara. Route 13 Lidah Kulon Surabaya. 28 April 2018

Video Dokumenter Waduk Sepat

Dian Purnomo. Wawancara. Sekretariat LPBP. 29 Mei 2018

Dian Purnomo, Orasi Unjuk Rasa “Selamatkan Waduk Sepat. Kantor  
Pemerintahan Kota Surabaya 30 Mei 2018



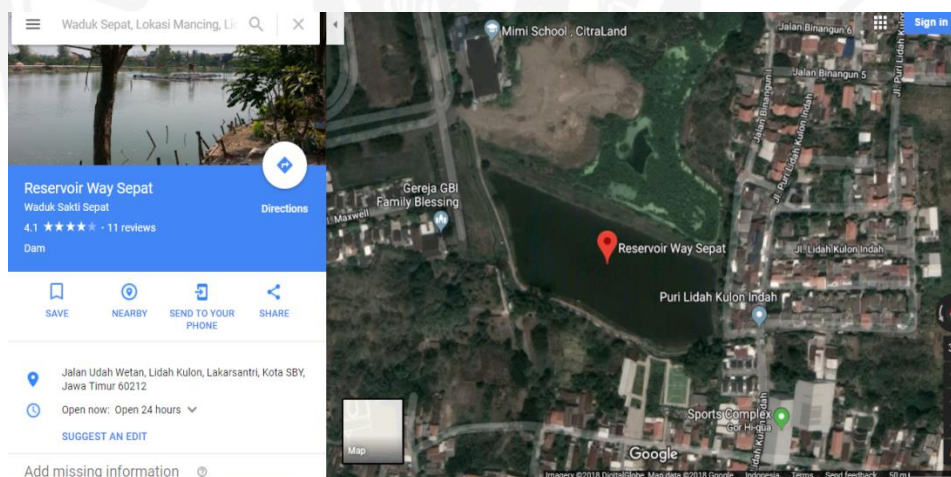
## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1



Gambar 1.1 Beberapa Tindakan Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Masyarakat (Hal. 4)  
Sumber : LBH Surabaya

### Lampiran 2



Gambar 4.1 Peta Waduk Sepat (Hal. 29)  
Sumber : Google Maps, 2018

### Lampiran 3



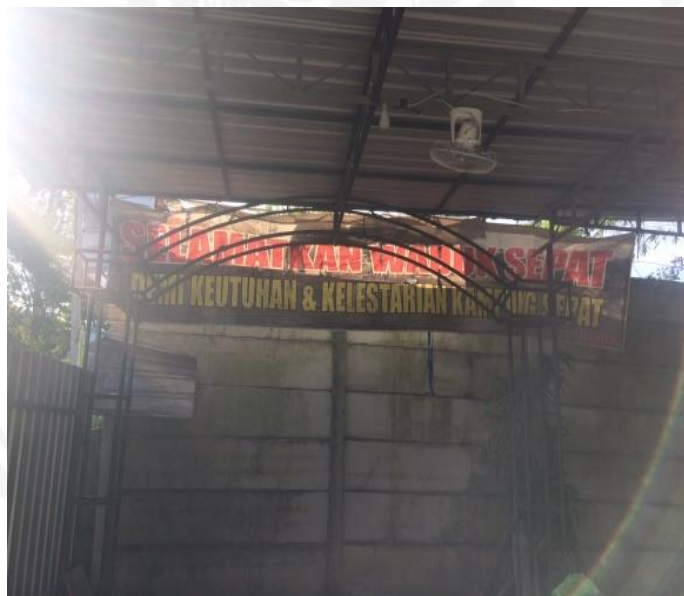
Gambar 5.1. Aksi Unjuk Rasa LPBP dan beberapa LSM (Hal. 63)

Sumber : Dokumentasi Penulis

## DOKUMENTASI PENELITIAN



(Baliho “Selamatkan Waduk Sepat” di Pintu Masuk Waduk Sepat)



(Pemagaran di sekitar Waduk yang dilakukan oleh Pihak PT. Ciputra Surya dan Pemerintah Kota Surabaya)





(Wawancara dengan Mas Dian Purnomo di tempat kediaman Mas Dian yang biasa dipakai untuk tempat berkumpulnya Laskar Pembela Bumi Pertiwi)



(Diskusi Pemutaran Film Waduk Sepat yang dilakukan pada tanggal 28 April 2018 di Route 13 Lidah Kulon Surabaya)



(Kondisi Waduk Sepat yang di potret dari sela-sela pemagaran Waduk Sepat)



(Masjid yang masih ada di sekitar kawasan Waduk Sepat)



(Kondisi Pemagaran Waduk Sepat)